



# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN IV

# 2025



*STASIUN PSDKP BELAWAN*

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

# Kata Pengantar

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nyalah Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 20 Januari 2026



Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
kelautan dan Perikanan Belawan

**Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H**

NIP. 19830730 200801 1 003

# Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Program UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 8 sasaran kegiatan, yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif;
3. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan;
5. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan;
6. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
7. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
8. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan dengan nilai **NKO 107,86**. Selama Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan perhitungan atas capaian 21 indikator kinerja, sebagaimana mekanisme penilaian terhadap indikator kinerja dimaksud. Berikut capaian atas 21 indikator kinerja:

1. Indeks Kualitas Pembangunan Pokmaswas dengan target 82 dan capaian sebesar 82;
2. Indeks operasi kapal pengawas dengan target 92 dan capaian sebesar 95,69;

3. Indeks operasi speedboat pengawas dengan target 92 dan capaian sebesar 95;
4. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
5. Nilai kualitas operasi intelijen Kelautan dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
6. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
7. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan dengan target 82 dan capaian sebesar 100;
8. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan dengan target 82 dan capaian sebesar 100;
9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan target 81 dan capaian sebesar 81;
10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dengan target 81 dan capaian sebesar 81;
11. Indeks penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dengan target 81 dan capaian sebesar 81;
12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Belawan dengan target 71,5 dan capaian sebesar 90,83;
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan target 92 dan capaian sebesar 93,66;
14. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Belawan dengan target 81 dan capaian sebesar 84,89;
15. Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Belawan dengan target 86 dan capaian sebesar 87,25;
16. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan target 100 dan capaian sebesar 100;
17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup stasiun psdkp Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan target 95 dan capaian sebesar 100;
18. Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan target 80 dan capaian sebesar 93,13;
19. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan target 75 dan capaian sebesar 80,81;
20. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Belawan dengan target 77 dan capaian sebesar 81,13;
21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja dengan target 70 dan capaian sebesar 81,37;

Realisasi anggaran pada Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 92,25% atau sebesar **Rp 26,441,123,902,-** (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) dari alokasi anggaran **Rp 28.661.393.000,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Melalui Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja guna mendorong pencapaian target pada tahun berikutnya.

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	2
Ikhtisar Eksekutif .....	3
Daftar Isi .....	6
Daftar Tabel.....	7
Daftar Gambar .....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Maksud dan Tujuan .....	2
C.    Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A.    Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029 .....	7
B.    Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 – 2029 .....	9
C.    Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	10
D.    Pengukuran Capaian Kinerja .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A.    Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025 .....	13
B.    Analisis Pencapaian Kinerja.....	16
BAB IV PENUTUP .....	77
A.    Kesimpulan.....	77
B.    Saran dan Rekomendasi.....	77

## Daftar Tabel

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan Speedboat siap operasi.....	5
Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja .....	6
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 .....	11
Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 .....	13
Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 .....	15
Tabel 6. Capaian IK 1.....	17
Tabel 7. Perbandingan IK 1 antar UPT .....	17
Tabel 8. Capaian IK 2.....	20
Tabel 9. Perbandingan IK 2 antar UPT .....	20
Tabel 10. Perhitungan capaian IKU 2.....	20
Tabel 11. Realisasi Hari Operasi Kapal Pengawas.....	20
Tabel 12. Capaian IKU 3.....	23
Tabel 13. Perbandingan IK 3 antar UPT .....	23
Tabel 14. Perhitungan Capaian IKU 3 .....	24
Tabel 15. Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan .....	25
Tabel 16. Monitoring Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana .....	26
Tabel 17. Capaian IKU 4.....	26
Tabel 18. Perbandingan IK 3 antar UPT .....	27
Tabel 19. Perhitungan Capaian Indeks.....	27
Tabel 20. Capaian IKU 5.....	30
Tabel 21. Perbandingan IK 5 antar UPT .....	30
Tabel 22. Perhitungan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan.....	31
Tabel 23. Capaian IKU 6.....	34
Tabel 24. Perbandingan IK 6 antar UPT .....	34
Tabel 25. Perhitungan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan .....	35
Tabel 26. Capaian IKU 7.....	38
Tabel 27. Perbandingan IK 7 antar UPT .....	38
Tabel 28. Perhitungan Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan TW IV Tahun 2025 .....	39
Tabel 29. Capaian Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 .....	40
Tabel 30. Capaian kegiatan pemeriksaan pelaku usaha Pemanfaatan produk/jasa kelautan.....	41
Tabel 31. Capaian kegiatan pemeriksaan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran.....	41
Tabel 32. Data Rekapitulasi Jumlah Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan.....	42
Tabel 33. Pengawasan sumber daya perikanan di TW IV Tahun 2025 .....	44
Tabel 34. Capaian IKU 8.....	44
Tabel 35. Perbandingan IK 8 antar UPT .....	45
Tabel 36. Nilai pelaku usaha perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2025 .....	46
Tabel 37. Rekapitulasi Penerbitan SLO.....	46
Tabel 38. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Kapal Perikanan.....	47
Tabel 39. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Tahun 2025 .....	48
Tabel 40. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Importasi TW IV Tahun 2025.....	48
Tabel 41. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Importasi Tahun 2025.....	48
Tabel 42. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan Tahun 2025 .....	49
Tabel 43. Tabel perhitungan Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan .....	49
Tabel 44. Rekapitulasi Pengawasan Sumber Daya Pengawasan Tahun 2025 .....	50
Tabel 45. Capaian IKU 9.....	51
Tabel 46. Perbandingan IK 9 antar UPT .....	51
Tabel 47. Rekapitulasi sanksi administratif.....	52

Tabel 48. Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan .....	54
Tabel 49. Capaian IKU 10 .....	54
Tabel 50. Perbandingan IK 10 antar UPT .....	54
Tabel 51. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan .....	56
Tabel 52. Capaian IKU 11 .....	56
Tabel 53. Perbandingan IK 10 antar UPT .....	56
Tabel 54. Capaian NKPA Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2025 .....	59
Tabel 55. Capaian IK 12 .....	59
Tabel 56. Perbandingan IK 12 antar UPT .....	59
Tabel 57. Capaian IKU 13 .....	61
Tabel 58. Perbandingan IK 24 antar UPT .....	61
Tabel 59. Capaian IK 13 .....	62
Tabel 60. Perbandingan IK 163 antar UPT.....	62
Tabel 61. Nilai Akuntabilitas Stasiun PSKP Belawan.....	63
Tabel 62. Capaian IK 15 .....	64
Tabel 63. Perbandingan IK 15 antar UPT .....	64
Tabel 64. Capaian IK 16 .....	65
Tabel 65. Perbandingan IK 16 antar UPT .....	65
Tabel 66. Capaian IK 16 .....	66
Tabel 67. Perbandingan IK 16 antar UPT .....	67
Tabel 68. Capaian IK 18 .....	68
Tabel 69. Perbandingan IK 18 antar UPT .....	68
Tabel 70. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Belawan.....	70
Tabel 71. Capaian IK 14 .....	70
Tabel 72. Perbandingan IK 14 antar UPT .....	70
Tabel 73. Capaian IK 20 .....	72
Tabel 74. Perbandingan IK 20 antar UPT.....	72
Tabel 75. Capaian IK 19 .....	73
Tabel 76. Perbandingan IK 19 antar UPT .....	73
Tabel 77. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis Triwulan IV tahun 2025.....	74
Tabel 78. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja .....	77

# Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan.....	4
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan .....	5
Gambar 3. Sistematisa Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan .....	6
Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan .....	13

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disebut juga "good governance".

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud :**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap Tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

### **2. Tujuan :**

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap Tahun, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

## **C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan, antara lain:

### **1. Bidang Perikanan Tangkap**

- a. Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di Wilayah Stasiun PSDKP Belawan;
- b. Adanya dugaan kegiatan transshipment di laut;
- c. Tidak terpantaunya kapal – kapal perikanan melalui radar VMS;
- d. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan.
- e. Masih terdapat kegiatan penangkapan yang merusak.

### **2. Bidang Perikanan Budidaya**

- a. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- b. Masih terdapatnya pelaku usaha yang belum memiliki CBIB dan CPIB.
- c. Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki perizinan dasar yaitu PKKPR

### **3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan**

- a. Masih terdapatnya UPI yang tidak memiliki SIUP dan SKP.

### **4. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan**

- a. Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki izin PKKPR.

- b. Penambangan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau- pulau kecil.
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

## **D. Data Umum Organisasi**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **2. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Sub Bagian Umum serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti berikut :

#### **a. Kepala Stasiun:**

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

**b. Kepala Subbagian Umum:**

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

**c. Kelompok Jabatan Fungsional:**

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

**f. Satuan Pengawasan SDKP:**

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 (tiga) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 9 (sembilan) Wilayah Kerja (Wilker) sebagaimana Struktur Organisasi pada Gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

### 3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 Propinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Riau) dan 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 571, meliputi perairan Selat Malaka. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

Dalam pelaksanaan operasional pengawasan di wilayah kerja, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan membawahi 3 Satuan Pengawasan SDKP, yaitu:

- 1) Satuan Pengawasan SDKP Asahan
- 2) Satuan Pengawasan SDKP Langsa
- 3) Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir

### 4. Armada Pengawas dan Speedboat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP didukung dengan armada kapal pengawas dan speedboat pengawas. Berikut data kapal pengawas dan speedboat pengawas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Armada Kapal Pengawas dan Speedboat siap operasi

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Lokasi / Stasiun
1	Hiu 01	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
2	Hiu 08	28 Meter	Stasiun PSDKP Belawan
3	Hiu 16	32 meter	Stasiun PSDKP Belawan
4	Napoleon 028	12 meter	Stasiun PSDKP Belawan

Sumber: Bagian Operasi Armada Stasiun PSDKP Belawan

## 5. Kepegawaian

Jumlah keseluruhan pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Tahun 2025 sebanyak 128 orang, yang terdiri dari PNS Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP sebanyak 69 orang, 25 orang PPPK, 9 orang PPNPN dan PJLP sebanyak 25 orang, untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel di bawah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Belawan berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	PPNPN	PJLP	Jumlah
1	Stasiun PSDKP Belawan	28	7	5	13	53
2	Satwas SDKP Langsa	3			1	4
3	Wilker PSDKP Idi	2			2	4
4	Wilker PSDKP Lhokseumawe	1	1			2
5	Wilker PSDKP Biureun	1				1
6	Wilker PSDKP Sigli		1			1
7	Satwas SDKP Asahan	5	3	3	1	12
8	Wilker PSDKP Batubara				1	1
9	Satwas SDKP Rokan Hilir	3		1	1	5
10	Wilker PSDKP Panipahan				1	1
11	Wilker PSDKP Dumai	1			1	2
12	Wilker PSDKP Kepulauan Meranti	2				2
13	Wilker PSDKP Tembilahan	2				2
14	Hiu 01	8	3		1	12
15	Hiu 08	6	5		1	12
16	Hiu 16	7	3		2	12
	Luar Belawan		2			2
Jumlah Total		69	25	9	25	128

Sumber: Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Stasiun PSDKP Belawan

## E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :



Gambar 3. Sistematika Penyusunan Lkj Stasiun PSDKP Belawan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: <sup>(1)</sup>Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025 - 2029; <sup>(2)</sup>Manual Indikator Kinerja Tahun 2025; <sup>(3)</sup>Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025; <sup>(4)</sup>Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025.

### A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2025-2029

Sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional dan selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peran sektor kelautan dan perikanan adalah engine growth bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang diwujudkan melalui peningkatan produktivitas hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025 - 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025 – 2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2025 - 2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP periode 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan

keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

## **2. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Sebagai penjabaran dari Visi KKP tahun 2025-2029, telah dirumuskan 4 (empat) Tujuan pada Renstra KKP tahun 2025-2029, yakni:

1. meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendukung pencapaian Tujuan KKP ke-2 dengan menetapkan Tujuan PSDKP tahun 2025-2029 yaitu :

1. "Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing".

Untuk mengukur tercapai tidaknya Tujuan tersebut telah ditetapkan Indikator Tujuan, "Indeks Kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan" pada tahun 2025 sebesar 76 menjadi 83,8 pada tahun 2029.

2. "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP". Dalam mendukung Indikator ini maka Ditjen PSDKP turut berperan dalam pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi KKP dengan target 90,05 pada tahun 2025 dan 90,25 pada tahun 2029.

## **B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Tahun 2025 – 2029**

Ditjen PSDKP memiliki Sasaran Program disertai indikator kinerja program, sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan;
3. Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan" Meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk itu UPT Stasiun PSDKP Belawan memaduserasikan dengan kebijakan Pusat yaitu pemfokusan kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Sasaran : Indonesia bebas illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

### **A. Program Kerja Pengawasan SDKP**

#### **1. Program**

Program merupakan instrument kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 2025 – 2029 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

## **2. Kegiatan**

Rumusan kegiatan tingkat UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
  - Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
  - Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
  - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Stasiun PSDKP Belawan.
- Selain kegiatan di atas Stasiun PSDKP Belawan juga berperan aktif dan terlibat dalam mendukung program ekonomi biru Menteri kelautan dan perikanan

## **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(3)</sup> Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang

Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029, ditetapkan yaitu “Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 4 strategi implementatif yaitu :

1. Memperkuat pengawasan kawasan konservasi;
2. Memperkuat pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota;
3. Memperkuat pengawasan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat;
4. Memperkuat pengawasan dalam pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Akan tetapi pada bulan Desember 2025 terdapat revisi Perjanjian Kerja. Adapun perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH
SK. 1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	01	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	82	82
SK. 2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	02	Indeks operasi kapal pengawas	92	92
		03	Indeks operasi speedboat pengawas	92	92
		04	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	100
SK. 3	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	05	Nilai kualitas operasi intelijen Kelautan	75	100
		06	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	75	100
SK. 4	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	07	Nilai kualitas pengawasan sumber daya Kelautan	100	82
SK. 5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	08	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	100	82
SK. 6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran	09	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	92	81

	administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	92	81
SK.7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	94	81
SK. 8	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Belawan	81,5	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	92	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Belawan	87	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Belawan	88	86
		16	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100%	100%
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup stasiun psdkp Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%	95%
		18	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Belawan	88,5	80
		19	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80	75
		20	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Belawan	1	77
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	70

#### D. Pengukuran Capaian Kinerja

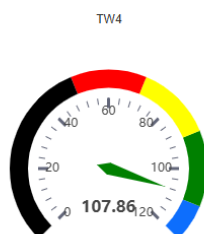
Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Tahunan didukung dengan pengukuran pada aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

**1. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025** Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja. Nilai Rata-rata Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Belawan sebesar 107,86% untuk Triwulan IV, capaian dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Gambar 4. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) Stasiun PSDKP Belawan

Rata-rata NPSK diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas 21 indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk NPSK akan diuraikan lebih lanjut.

**2. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025 Tahunan** Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya pada Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Tahun 2025 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
					2025	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	s/d DESEMBER	
<b>SK.01</b>	<b>Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif</b>						<b>100</b>			<b>100</b>	
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	82	100	82	82	100
<b>SK.02</b>	<b>Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif</b>						<b>102,08</b>			<b>102,08</b>	
2	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	95,69	104,01	92	95,69	104,01
3	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	95	103,26	92	95	103,26

	4	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	Persentase	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100	100	100	100
<b>SK.03</b>	<b>Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif</b>							<b>100</b>			<b>100</b>	
	5	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100	100	100	100
	6	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100	100	100	100
<b>SK.03</b>	<b>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</b>							<b>120</b>			<b>120</b>	
	4	Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120	80	100	120
<b>SK.04</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan</b>							<b>120</b>			<b>120</b>	
	7	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	100	120	82	100	120
<b>SK.05</b>	<b>Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan</b>							<b>120</b>			<b>120</b>	
	8	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82	82	100	120	82	100	120
<b>SK.06</b>	<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>							<b>100</b>			<b>100</b>	
	9	Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	81	100	81	81	100
	10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	81	100	81	81	100
<b>SK.07</b>	<b>Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>							<b>100</b>			<b>100</b>	
	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	81	100	81	81	100
<b>SK.08</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>							<b>108,64</b>			<b>108,64</b>	
	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,5	71,5	90,83	120	71,5	90,83	120
	13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92	92	93,66	101,8	92	93,66	101,8
	14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Belawan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81	81	84,89	104,8	81	84,89	104,8
	15	Penilaian Mandiri SAKIP SAKIP Satker Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	87,25	101,45	86	87,25	101,45
	16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Belawan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100	100	100	100
	17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	95	100	105,26	95	100	105,26

		dilengkapi dan disampaikan										
18		Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	93,13	116,41	80	93,13	116,41
19		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75	75	80,81	107,75	75	80,81	107,75
20		Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Belawan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	77	81,13	105,36	77	81,13	105,36
21		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	70	81,37	116,24	70	81,37	116,24

Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan menetapkan 21 Indeks Kinerja dan dalam aktualisasinya 21 IK dilaksanakan dengan kriteria 21 IK tersebut dengan predikat baik. Pelaksanaan kegiatan dalam pemenuhan IK dimaksud terdapat kendala maupun faktor pendukung yang mendorong tercapainya kegiatan atas IK yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Realisasi anggaran pada Tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sebesar 92,19% atau sebesar **Rp 26,441,123,902,-** (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) dari alokasi anggaran **Rp 28.661.393.000,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Tabel 5. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	12,804,051,000	11,154,403,854	83.75%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	124,487,000	121,751,282	97.80%
3	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	390,708,000	384,491,688	98.41%
5	Dukungan Manajemen	15,342,147,000	15,286,720,048	99.64%
<b>Total</b>		<b>28,661,393,000</b>	<b>26,441,123,902</b>	<b>92.25%</b>

## B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 21 indeks kinerja yang dapat dicapai oleh Stasiun PSDKP Belawan pencapaian terhadap evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif

Sasaran kegiatan pertama menghasilkan 1 indikator kinerja utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu "Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)"

#### a. IKU 1: Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS). Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun PSDKP Belawan. Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah laporan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

#### Formula:

$$d. x = \frac{(a+b+c)}{100}$$

#### Keterangan:

- $x$  : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS  
 $a$  : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)  
 $b$  : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)  
 $c$  : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

Selama tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan memperoleh capaian atas IKU ini sebesar 82 dari target 82. Pada tahun 2025 kegiatan pembinaan POKMASWAS tidak dilaksanakan dikarenakan ada efisiensi. Akan tetapi capaiannya tetap dianggap tercapai sesuai target karena tidak

terlaksananya IK 1 ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran bukan dikarenakan hal teknis lainnya.

Berikut kami sajikan capaian dalam bentuk tabel

Tabel 6. Capaian IK 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	82	82	100	100	-	-	-

Tabel 7. Perbandingan IK 1 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	82	82	82	82	82	82	82	-

Stasiun PSDKP Belawan melaksanakan IK 1 pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai capaian yang maksimal. Sedangkan pada tahun 2025 kegiatan pembinaan POKMASWAS tidak dilaksanakan dikarenakan ada efisiensi. Akan tetapi capaiannya tetap dianggap tercapai sesuai target karena tidak terlaksananya IK 1 ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran bukan dikarenakan hal teknis lainnya.

**Analisa penyebab tidak terlaksananya IK 1 diantaranya;**

- Adanya efisiensi anggaran di UPT Stasiun PSDKP Belawan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan POKMASWAS;
- Adanya perubahan manual IKU menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran.

**2. Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif**

Sasaran kegiatan kedua menghasilkan 3 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan diantaranya;

Sasaran kegiatan kedua menghasilkan 3 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan diantaranya;

1. Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);

3. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%) Penjabaran sasaran kegiatan pada 3 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan pengelolaan terhadap armada yaitu Kapal Pengawas Hiu 02, Hiu 08 dan Hiu 16, dalam melakukan pengawasan pada WPPNRI 571.

#### a. IKU 2 : Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)

Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan merupakan salah satu indikator kinerja yang dipakai untuk menentukan sejauh mana Stasiun PSDKP Belawan mengoptimalkan armada pengawasan dalam hal ini kapal pengawas di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan terutama di WPP NRI 571. Secara sederhana dalam informasi indikator kinerja IKU ini didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

#### Keterangan:

IKP = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

#### 1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

*Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan*

*Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]*

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target tersebut diatas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

## **2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)**

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

## **3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)**

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Komponen ini bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

## **4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)**

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

### **Kriteria Penilaian :**

Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

Sampai dengan akhir tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh capaian dengan nilai sangat baik yaitu sebesar **95,69** dari target Tahunan sebesar **92**. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 8. Capaian IK 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	92	95,69	97,6	99,41	89,7	-	89

Tabel 9. Perbandingan IK 2 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Ponti anak	Kupang	Tara kan	Tahu na
SK.2	Terselenggara nya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	IKU 2 Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	95,69	92,19	97,50	83,69	93,00	95,00	95,83	97,50

Jika dilihat pada tabel yang tersaji di atas maka capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai target. Perhitungan atas capaian indeks kinerja ini kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Perhitungan capaian IKU 2

No	Sektor	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)		Pemeriksaan Kelautan (20%)		Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)		Pemeriksaan Cekupan Wilayah Pengawasan (40%)		Intersept Target Operasi (80%)		Dukungan Kegiatan SAR (40%)		Tindakan Lanjut Target Operasi (2%)		Pelayanan Alat Tangkap Terampil (20%)		Pemulihan Rumpun Bagal (20%)		Dukungan Operasi Senjata (40%)		Total Nilai Indeks	Nilai per Sektor	
			TW IV	Realisasi	Nilai	TW IV	Realisasi	Nilai	TW IV	Realisasi	Nilai	TW IV	Realisasi	Nilai	TW IV	Realisasi	Nilai	TW IV	Realisasi	Nilai	TW IV	Realisasi			Nilai
1	Stasiun PSDKP Belawan	HP Hiu 01	120	120	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		HP Hiu 08	120	120	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		HP Hiu 16	120	159	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75

Realisasi anggaran operasi kapal pengawas tahun 2025 sebesar Rp 9,335,459,263,- atau sekitar 81,27% dari anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 11,486,639,000,-. Realisasi hari operasi kapal pengawas Hiu 01, Hiu 08 dan Hiu 16 dapat di lihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Realisasi Hari Operasi Kapal Pengawas

Bulan	Kapal Pengawas		
	Hiu 01	Hiu 08	Hiu 16
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	8	6	8
Juni	3	0	2
Juli	5	8	5
Agustus	0	0	4
September	12	0	3

Oktober	6	4	15
November	0	17	5
Desember	15	12	12
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>54</b>

**Analisa penyebab keberhasilan,** capaian indikator kinerja Indeks kinerja operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan dipengaruhi beberapa faktor antara lain;

1. **Pemeriksaan melebihi target yang ditetapkan.** Pencapaian terhadap indeks kinerja operasi kapal pengawas salah satunya berasal dari target pemeriksaan objek kelautan dan perikanan. Kapal pengawas diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 kapal perikanan per hari operasi dan 1 objek kelautan per periode operasi. Pemeriksaan yang melewati target menjadi salah satu aktualisasi Belawan sehingga dalam suatu periode operasi jika KP tidak mampu memenuhi target operasi dikarenakan cuaca dan faktor lainnya maka kelebihan dari target dapat menjadi semacam tabungan yang mengamankan perhitungan indeks kinerja pada komponen pemeriksaan kapal perikanan.
2. Menyusun rencana operasi yang matang dan tepat sasaran, penyusunan rencana operasi dibuat dengan memperhitungkan aspek pendukung seperti wilayah potensi pelanggaran, pemeriksaan atas aktifitas pada Kawasan konservasi maupun data analisis SPKP;
3. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi berdasarkan peta kerawanan dan laporan masyarakat, terus mengupdate data kerawanan yang berbasis pelaporan maupun pemantauan;
4. Melakukan evaluasi terhadap capaian hari operasi dan hasil pengawasan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Stasiun PSDKP Belawan dapat membantu dan menilai pada saat operasi dilaksanakan apa saja yang menyebabkan kegiatan operasi tidak optimal dan dapat menentukan langkah pencegahannya.

**Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan,** diantara kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja adalah **Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas,** walaupun kegiatan tersebut merupakan indikator kinerja yang berbeda tetapi merupakan aspek yang berjalan beriringan mendorong keberhasilan indeks operasi kapal. Pelaksanaan dan penjadwalan terkait perawatan rutin, darurat, serta docking maupun pembelian suku cadang direncanakan sematang dan sesuai kebutuhan kapal pengawasan sehingga operasi dapat berjalan optimal.

### **b. IKU 3: Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)**

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indeks

kinerja yang dipakai untuk mengukur optimalitas dari armada *speedboat* yang berada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat didefinisikan sebagai sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

**Formula:**

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Isp = Indeks kinerja Speedboat Pengawas
- Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
- Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas
- Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

**Keterangan pola perhitungan**

- TW I = TW I
- TW II = (TW I + TW II)/2
- TW III = (TW I + TW II + TW III)/3
- TW IV = (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4

**VARIABEL PEMBENTUK**

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
  - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
  - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
  - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan atau objek kelautan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
  - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)

- Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
    - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
    - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
    - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
  4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
    - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
    - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
    - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
    - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi speedboat Pengawas secara keseluruhan.

Dalam kurun waktu tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan operasi *speedboat* pengawasan yang berada dan tersebar diseluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Capaian yang diperoleh sebesar **95** dari **target sebesar 92 pada tahun 2025**. Capaian indeks kinerja dimaksud kami sajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 12. Capaian IKU 3

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	92	95	100	100	92,13	-	89

Tabel 13. Perbandingan IK 3 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.2	Terselenggara ranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	IKU 3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (indeks)	95	92,19	97,50	83,69	93,00	95,00	95,83	97,50

Selama tahun 2025 capaian indeks kinerja operasi speedboat melebihi target yang ditentukan yaitu 95. Perhitungan terhadap capaian indeks kinerja speedboat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 14. Perhitungan Capaian IKU 3

Rata-Rata Indeks Kinerja Operasi		95,00														
Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Kriteria Nilai > 48 Hijau < 48 Merah	Kriteria Nilai > 44 Hijau < 44 Merah	Kriteria Nilai > 1 Hijau < 1 Merah	Tindak Lanjut Target Operasi (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)	
		TW IV			TW IV			TW IV			TW IV					
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai			
Stasiun PSDKP Belawan	Napoleon 28	27	75	138,9	2	1	25,0	50,00	0,00018	0,00036	45,00	0	0	0,00	95,00	95,00

**Analisa penyebab keberhasilan** capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pengawasan yang matang dan tepat sasaran, rencana pengawasan dengan speedboat dilaksanakan dengan memperhitungkan data pengawasan terdahulu sebagai informasi awal dalam penetapan RO;
2. Melakukan pemetaan terhadap wilayah operasi, hal ini dimaksudkan agar memudahkan menentukan target operasi ataupun potensi wilayah pengawasan baik pengawasan perikanan maupun kelautan berdasarkan data pengawasan yang terlebih dahulu telah dilaksanakan sesuai pola dan kebiasaan pada kurun waktu tertentu, sehingga wilayah operasi dapat disesuaikan dengan wilayah potensi pelanggaran berdasarkan waktu ideal terjadinya;
3. Memenuhi kebutuhan logistik awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan selama melaksanakan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan berupa makanan, minuman, air bersih, maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal

**Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan** indeks kinerja operasi speedboat antara lain:

1. Melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada. Secara teori, keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi armada speed sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang, kondisi ini akan menentukan sejauh mana perawatan dan pemeliharaan akan dilakukan;
2. Memenuhi kebutuhan logistic awak *speedboat* dalam menunjang kegiatan operasi, dengan melengkapi awak dengan perbekalan maupun sarana keselamatan sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal;

Realisasi anggaran yang dicapai dalam mendukung capaian Indeks kinerja operasi speedboat pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah sebesar Rp 116,143,831,- atau 99,97% dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp 116,177,000,-. Capaian hari seluruh armada *speedboat* yang tersebar di Stasiun PSDKP Belawan selama tahun 2025 telah melaksanakan 27 hari operasi dari 1speedboat Pengawasan yaitu Napoleon 028. Realisasi hari operasi armada

speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15. Realisasi armada speedboat lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Bulan	Hari Operasi Speedboat
	Napoleon 028
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	3
Juli	7
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	12
Desember	5
<b>Total</b>	<b>27</b>

**c. IKU 4 : Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)**

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan Stasiun PSDKP Belawa adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sarana Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan meliputi : 3 (tiga) unit Kapal Pengawas Perikanan (KP HIU 01, KP HIU 08, KP HIU 16) dan 1 (satu) unit Speedboat (Napoleon 028).

Perawatan Sarana Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan terdiri dari :

- a. perawatan pencegahan (preventive maintenance **50%**),
- b. perawatan prediktif (predictive maintenance **40 %**)
- c. perawatan darurat (breakdown maintenance **10%**).

FORMULA PERHITUNGAN :

$$X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

- Xp = Persentase Perawatan Sarana
- xa = Preventive
- xb = Predictive

xc = Darurat

Pada tahun 2025 Perawatan rutin dilakukan terhadap KP HIU 01, KP HIU 08 dan KP HIU 16, sedangkan speedboat Napoleon 028 dilakukan pengedokan pelimbangan. Terlaksana juga pembelian suku cadang untuk KP HIU 16 dan Napoleon 028. Serta untuk Napoleon 028 dilakuakn analisa teknis kapal. Adapun detil pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Monitoring Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana

No	Kegiatan	Pagu	Uraian Kegiatan				Nilai Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan	Dokumen		Progress (%)	Keterangan
			Tender	Pengadaan Langsung	Penunjukan Langsung	Swakelola			Sudah	Belum		
<b>A. Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas</b>												
1.	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas 28 Meter	Rp147.524.000		✓			Rp 147.523.555	Tiap Bulan	✓		100%	
2.	Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas 32 Meter	Rp 59.395.000		✓			Rp 59.394.035	Tiap Bulan	✓		100%	
3.	Servis perlengkapan Navigasi dan Komunikasi	Rp 76.871.000		✓			Rp 76.870.400	1 Tahun sekali	✓		100%	
4.	Servis Perlengkapan Keselamatan dan PMK	Rp122.668.000		✓			Rp 122.667.210	1 Tahun sekali	✓		100%	
5.	Biaya Perencanaan Docking Kapal Pengawas HIU 16	Rp 33.500.000		✓			Rp 33.300.000	1 Tahun sekali	✓		100%	
<b>B. Perawatan Pediktif Kapal Pengawas</b>												
1.	Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas	Rp 169.040.000		✓			Rp 162.652.100	Isidentil	✓		96,22%	
<b>C. Perawatan Darurat Kapal Pengawas</b>												
1.	Perawatan darurat Kapal Pengawas 28 Meter	Rp 170.477.000		✓			Rp 170.476.901	Isidentil	✓		100 %	
2.	Perawatan darurat Kapal Pengawas 32 Meter	Rp 79.579.000		✓			Rp79.578.800	Isidentil	✓		100 %	
<b>D. Perawatan Pencegahan Speedboat Pengawas</b>												
1.	Perawatan Rutin Bulanan Speedboat Pengawas Napoleon 028	Rp16.876.000		✓			Rp 16.875.788	Tiap Bulan	✓		100 %	
2.	Docking Speedboat Pengawas Napoleon 028	Rp 40.200.000		✓			Rp 40.200.000	1 Tahun sekali	✓		100 %	
<b>E. Perawatan Pediktif Speedboat Pengawas</b>												
1.	Pengadaan Suku cadang dan perlengkapan Speedboat Pengawas Napoleon 028	Rp73.000		✓			Rp 73.000	Isidentil	✓		100 %	
2.	Servis Perlengkapan Keselamatan dan PMK Speedboat Napoleon 028	Rp 6.957.000		✓			Rp 6.956.400	Isidentil	✓		100 %	
<b>F. Perawatan Darurat Speedboat Pengawas</b>												
1.	Perawatan Darurat Speedboat Napoleon 028	Rp 69.594.000		✓			Rp 69.166.150	1 Tahun sekali	✓		100 %	

Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan berhasil memperoleh **capaian sebesar 100%**, sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK 2025.

Tabel 17. Capaian IKU 4

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	100	100	100	92,13	-	89

Tabel 18. Perbandingan IK 3 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	IKU 3 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan Stasiun PSDKP Belawan adalah sebesar 100 sesuai dengan target tahun 2025.

Perhitungan atas capaian indeks kinerja ini kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 19. Perhitungan Capaian Indeks

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
<b>I PERAWATAN PREVENTIF (50)</b>						
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	12	12	100	50	Laporan harwat rutin
2	Pengedockan/Pelimbangan	1	1	100		Laporan dan BAST Docking
3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	3	3	100		Laporan Pengecekan
<b>II PERAWATAN PREDIKTIF (40)</b>						
1	Suku Cadang	12	12	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
2	Perlengkapan Kapal	1	1	100		Dokumen pembelian perlengkapan

**Analisa penyebab keberhasilan** capaian IKU dimaksud, diantaranya:

1. Menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana yang tepat sasaran, rencana dilaksanakan dengan komunikasi yang baik ke nahkoda kapal pengawas sebagai informasi awal;
2. Melakukan pemetaan terhadap sarana prasarana dengan menghitung waktu masa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki, sehingga dapat disesuaikan dengan hari operasi kapal pengawas;
3. Melakukan pemetaan dengan menghitung masa pakai suku cadang dan perlengkapan, sehingga dapat pembelian dapat efisien dan terkontrol;
4. Memenuhi kebutuhan suku cadang dalam menunjang kegiatan selama melaksanakan operasi, sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal.

**Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan** indeks kinerja operasi speedboat antara lain:

1. Melaksanakan perawatan dan pemenuhan suku cadang dalam menjaga performa armada. Secara teori, keberhasilan atas IKU ini bergantung kepada kelayakan operasi armada sehingga perlu diperhatikan komponen yang menunjang semisal performa mesin maupun suku cadang, kondisi ini akan menentukan sejauh mana perawatan dan pemeliharaan akan dilakukan;
2. Memenuhi kebutuhan suku cadang dalam menunjang kegiatan selama melaksanakan operasi, sehingga pelaksanaan patrol lebih optimal.

Realisasi anggaran yang dicapai dalam mendukung capaian Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan adalah sebesar Rp 1,194,293,465,- atau 99,42% dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp 1,201,235,000,-.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Melaksanakan docking KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08;
2. Melaksanakan pengadaan kelengkapan kapal pengawas;
3. Melaksanakan pengadaan sarana pendukung operasional kapal pengawas;
4. Melaksanakan analisa teknis kapal;
5. Penyediaan suku cadang kapal pengawas;

### 3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif

Sasaran kegiatan ketiga menghasilkan 2 indikator kinerja utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu :

- a. Nilai kualitas operasi intelijen Kelautan;
- b. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan.

#### a. IKU 5 : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.

Nilai kualitas operasi intelijen kelautan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen.

Formula :

$$X = \sum_{i=1}^n \left( \frac{Xi + \dots + Xn}{n} \right)$$

Keterangan :

X: nilai kualitas operasi intelijen kelautan

Xi : nilai data operasi intelijen kelautan

n : jumlah operasi intelijen kelautan

Kriteria nilai data operasi intelijen kelautan

1. Kredibel dan diterima terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94
B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42
E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

3. Tidak Kredibel dan ditolak :

Kriteria		Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19
D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17
E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	15
E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	12
E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	9
E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	6
F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan	3
F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar	0

Capaian jumlah kegiatan Operasi Intelejen Kelautan Stasiun PSDKP Belawan sampai dengan TW IV 2025 sebesar 8 kegiatan pengawasan dari target 1 kegiatan pengawasan Dimana dari 8

kegiatan tersebut memiliki **Nilai kualitas operasi intelijen kelautan** sebesar 100, sedangkan target tahunan 2025 yang ditetapkan yaitu sebesar 75. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Capaian nilai kualitas operasi intelegen kelautan merupakan IKU baru di tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20. Capaian IKU 5

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	-	-	-	-	-

Tabel 21. Perbandingan IK 5 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
<b>SK.3</b>	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	IKU 5 Nilai kualitas operasi intelijen Kelautan	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 22. Perhitungan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

No	UPT/Satwas	No SPT	Pelaksana	Tanggal	Kegiatan	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Rekomendasi	Nilai
1	Satwas PSDKP Langsa	B. 1936/PSD KPSta.2/K P.440/X/2 025	Muhammad Hamdani, Muhammad Fahrul Riza, Bobby Novrizal Tambunan	27 S.D 28 Oktober 2025	Melakukan Kegiatan Pulbaket Terkait Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Pelaku usaha Warung/Pondok Makan Minum	Pemanfaatan Ruang Laut	Ujung Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Langsa, provinsi Aceh	1. berdasarkan pengumpulan bahan dan keterangan bahwa Pondok Mama Muda diduga memanfaatkan ruang laut berupa Bagunan atau pondok Santai tempat duduk pengunjung pantai. 2. Untuk dilakukan kegiatan pengawasan ruang laut terhadap Pondok Mama Muda yang diduga memanfaatkan ruang laut	A1 (100)
2	Stasiun PSDKP Belawan	B.1797/PSDKP Sta. 2/KP.440/X/2 025	Muhammad Iqbal, Ira Gustiana, Rifka Ade Shinta, Rio Sakti	5 s.d 7 Oktober 2025.	Melakukan Kegiatan Pulbaket Terkait Kegiatan Pemanfaatan ruang laut	1. PT Telekomunikasi Indonesia, 2. PT Indosat Ooredoo Hutchison, 3. PT Triasmitra	Submarine Pipeline	Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.	Berdasarkan data dari website e-sea milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak ditemukan adanya jalur kabel yang memiliki landing Point di Kabupaten Serdang Bedagai. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa ketiga Perusahaan tidak memiliki izin PKKPR. Namun hal ini dapat pula terjadi karena tiga Perusahaan ini masih memiliki dokumen perizinan lama yang masih berlaku, hingga pasal 549 dalam PP 28 Tahun 2025	A1 (100)
3	Satwas SDKP Asahan	B. 1977/PSDKPSta. 2/KP.44 0/XI/ 2025	Rihat Hutahayan ,Imran Rosyadi, Benardo Nababan, Argius Wansyah	5 S.D 6 Novemb er 2025	Melakukan Kegiatan Pulbaket Terkait Kegiatan Pemanfaatan Sedimentasi Laut	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Batubara	Pemanfaatan Sedimentasi Laut	Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara	tidak ditemukan adanya aktivitas kapal pengeruk pasir ataupun sedimen laut di perairan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dan dokumentasi foto kapal yang digunakan terindikasi tidak benar.	A1 (100)
4	Stasiun PSDKP Belawan	B.1996/PSDKP Sta. 2/KP.440/XI/2 025	Muhammad Iqbal, Rifka Ade Shinta	7 Novemb er 2025.	pemenuhan kepatuhan dalam ketentuan pemanfaatan ruang laut.	PT Sungai Wang	Pemanfaatan Ruang Laut	Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;	Tindak Lanjut yg akan dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan Bapak Sembiring dan menjadwalkan pengawasan insidental pada areal tersebut	A1 (100)
5	Stasiun PSDKP Belawan	B.2115/PSDKP Sta. 2/KP.440/XI/2 025	Bobby Novriza Tambunan, Muhammad Iqbal, Juli Sasmita Sari, Lili Afriyanti	23 s.d 25 Novemb er 2025	tahapan pengenaan sanksi administrated di bidang kelautan dan perikanan.	Kantor Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)	Pemanfaatan Ruang Laut	Jl. Stadion H.Dimurthala No 08, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Putusan kontrak BUT Repsol Andaman B.V oleh pemerintah didasari dari usulan dari pihak Perusahaan itu sendiri, karena dalam upaya eksplorasinya, BUT Repsol Andaman B.V tidak menemukan adanya minyak bumi dalam jumlah yang signifikan; b) Dalam Kawasan PKKPR BUT Repsol Andaman B.V, tidak terdapat bangunan yang secara fisik menetap di areal tersebut; c) Area ini sedang dilelang oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, untuk mencari Kontraktor yang mampu untuk mengelola wilayah migas tersebut;	A1 (100)
6	Stasiun PSDKP Belawan	B.2183/PSDKP Sta. 2/KP.440/XII/ 2025	Muhammad Iqbal, Sila Sazali, Sri Kartaharja	7 s.d 10 Desemb er 2025	kegiatan pengumpulan bahan & keterangan perihal pemanfaatan ruang laut berupa keramba jaring apung	Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau	Pemanfaatan Ruang Laut	Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau	14.Berdasarkan keterangan dan informasi yang diperoleh selama di Kabupaten Kepulauan Meranti, maka kegiatan pengumpulan Bahan dan Keterangan ini akan dilanjutkan dengan berkomunikasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan Kantor Balai Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang satker Pekanbaru	A1 (100)
7	Stasiun PSDKP Belawan	B.2217/PSDKP Sta. 2/KP.440/XII/ 2025	Muhammad Iqbal	10 s.d 12 Desemb er 2025	kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan perihal pemanfaatan ruang laut berupa keramba jaring apung (KJA)	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Pemanfaatan Ruang Laut	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	1. Bidang Perikanan Budidaya menyampaikan bahwa mereka saat ini belum mengetahui secara pasti peta alokasi zona budidaya ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terkait draft rancangan peraturan daerah RTR sedang tahap pengesahan; 2. Dalam dua tahun terakhir, Bidang perikanan budidaya tidak memperoleh alokasi anggaran yang cukup sehingga pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan sangat minim.Mereka bahkan belum mengetahui perihal	A1 (100)
8	Stasiun PSDKP Belawan	B. 1793/PSDKPSt a.2/ KP.440/IX/20 25	Muhammad Hamdani, Muhammad Fahrul Riza, Bobby Novrizal Tambunan, Diah Murtala	1 s.d 2 Oktober 2025	kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan perihal pemanfaatan ruang laut	Kreung Geukuh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh	Pemanfaatan Ruang Laut	Kreung Geukuh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh	1. wawancara pertama atas nama agus salim selaku nelayan, didapatkan bahwa PT. PIM menggunakan dermaga sebagai loading bahan baku pembuatan pupuk, adanya indikasi pipa yang menyedot air laut, dan pernah terjadi matinya ikan dalam setahun 2 kali di area tersebut serta nelayan tidak diberikan sandar di dermaga tersebut hanya bisa labuh jangkar radius lebih kurang 100 dari kapal yang loading; 2. Berdasarkan hasil permintaan keterangan Tim satwas langsa melakukan Identifikasi melalui pengambilan dokumentasi berupa foto dan video yang Dimana tim berperan sebagai orang biasa yang ingin memancing di sekitar Pelabuhan dengan menggunakan wahana kapal; 3. Berdasarkan hasil permintaan keterangan Tim satwas langsa melakukan Identifikasi melalui pengambilan dokumentasi berupa foto dan video yang Dimana tim berperan sebagai orang biasa yang ingin memancing di sekitar Pelabuhan dengan menggunakan wahana kapal	A1 (100)
NILAI DATA OPERASI INTELIJEN KELAUTAN										800
JUMLAH OPERASI INTELIJEN KELAUTAN										8
<b>NILAI KUALITAS OPERASI INTELIJEN KELAUTAN</b>										<b>100</b>

**Analisa penyebab keberhasilan** yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait operasi intelejen, sehingga pelaksanaan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan dari sumber yang dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek operasi intelejen;
4. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menambah target pengawasan insidentil yang dilaksanakan;
5. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun **kendala** dalam melaksanakan IKU Nilai kualitas operasi intelijen kelautan antara lain:

1. Wilayah objek operasi intelejen yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek operasi intelejen;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;

**Analisa kegiatan lain yang menunjang** pencapaian yaitu:

1. *Briefing* rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan, operasi intelejen dan isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal, kegiatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan baik pada apel bagi ataupun pertemuan khusus;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 20,377,343,- atau 99,38% dari pagu sebesar Rp. 20,505,000,-.

#### **b. IKU 6 : Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan**

1. Intelijen perikanan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka

- pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan;
2. Operasi intelijen perikanan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan intelijen di bidang perikanan;
  3. Agen operasi intelijen perikanan adalah Pegawai pemerintah yang mendapatkan perintah Pengguna (user) untuk menjalankan operasi intelijen;
  4. Pengguna (user) operasi intelijen perikanan adalah Pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen perikanan;
  5. Penerima manfaat operasi intelijen perikanan adalah Menteri, Wamen, Dirjen lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Tahapan operasi intelijen meliputi aktivitas perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian intelijen perikanan;
  7. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan;
  8. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh Agen operasi intelijen perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan;
  9. Nilai respon hasil operasi intelijen perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindaklanjut informasi intelijen. Tindaklanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari Penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke Penerima manfaat;
  10. Dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.

FORMULA PERHITUNGAN :

$$y_{koiip} = (x_{tahapan} * 0.7* + (x_{respon} * 0.3*$$

Keterangan :

$y_{koip}$	:	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan
$x_{tahap}$	:	Nilai Rata – rata Kualitas Tahapan Operasi Intelijen Perikanan
$x_{respon}$	:	Nilai Respon Operasi Intelijen Perikanan

$$x_{tahap}(nilai) = \frac{\sum \text{nilai tahapan setiap operasi intelijen perikanan}}{\text{jumlah operasi intelijen perikanan}}$$

Dimana nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen perikanan mengacu pada table berikut :

No	Tahapan Operasi	Nilai Max	Output
1	Perencanaan	20	Analisa/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas; Uji taktik, mental, IT, Strategi
2	Pengumpulan	50	Laporan hasil lapangan/ LI
3	Pengolahan	20	Laporan Tugas (Lapgas)
4	Penyajian	10	Laporan Informasi khusus (infosus)

$$x_{respon}(nilai) = \frac{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang ditindaklanjuti Penerima Manfaat}}{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang disampaikan kepada Penerima Manfaat}} \times 100$$

Capaian jumlah kegiatan Operasi Intelejen Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan sebesar 1 kegiatan operasi dari target 1 kegiatan pengawasan **Nilai kualitas operasi intelijen Perikanan** yang dicapai sebesar 100 dari target tahunan 2025 yang ditetapkan yaitu sebesar 75. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23. Capaian IKU 6

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	-	-	-	-	-

Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan IKU baru di tahun 2025. Sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 24. Perbandingan IK 6 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.3	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	IKU 6 Nilai kualitas operasi intelijen Kelautan	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 25. Perhitungan Capaian Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan

No	UPT/ Satwas	Pelaksana	Tanggal	Kegiatan	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Rekomendasi	Tahapan Operasi (70%)				Nilai Tahapan Operasi (70%)	Nilai Respon (30%)	Total Nilai
									Perencanaan	Pengumpulan	Pengolahan	Penyajian			
1	Stasiun PSDKP Belawan	Tupa Prosasdi, Josia Suarta, Zulkarnain Nst, Adhi Kurniawan, Abul Hayyi, Rio Sakti	9-15 Januari 2025	Melakukan Kegiatan Pulbaket Terkait Indikasi Adanya Distribusi Komoditas Perikanan Impor Yang Tidak Sesuai Peruntukannya	Pemilik UPI di Gabion Belawan, Penjual ikan impor di pasar tradisional V Marelan	Distribusi Hasil Perikanan	Gabion Belawan dan Pasar Tradisional Marelan	1. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan disimpulkan bahwa : Benar terdapat komoditas perikanan impor yang didistribusikan tidak sesuai peruntukannya di pasar V Marelan Kota Medan; 2. Berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut : Agar dapat dilakukan penjejukan, penelusuran, serta pemanggilan terhadap pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan yang berada di gabion Belawan	20	50	20	10	70	30	<b>100</b>

**Analisa penyebab keberhasilan** yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait operasi intelejen, sehingga pelaksanaan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan dari sumber yang dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain;
3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek operasi intelejen;
4. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menambah target pengawasan insidentil yang dilaksanakan;
5. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun **kendala** dalam melaksanakan IKU Nilai kualitas operasi intelijen kelautan antara lain:

1. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek operasi intelejen;
2. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;

**Analisa kegiatan lain yang menunjang** pencapaian yaitu:

1. *Briefing* rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan, operasi intelejen dan isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal, kegiatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan baik pada apel bagi ataupun pertemuan khusus;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 29,911,680,- atau 99,71% dari pagu sebesar Rp. 30,000,000,-.

Di dalam pemenuhan IKU ini, terdapat belanja bahan perlengkapan intelejen seperti teropong, pulpen recorder dan jas hujan

#### **4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan**

Sasaran Kegiatan keempat menghasilkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu **Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan** lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan. Kondisi ini berbeda dengan penetapan perjanjian kinerja pada tahun 2024. Penjabaran sasaran kegiatan pada 1 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan

kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan pelaku usaha kelautan.

### **IKU 7: Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan**

Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan. Pengawasan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator yang terdiri dari:

- a. nilai penyelesaian pengawasan OSS,
- b. nilai penyelesaian pengawasan selain OSS,
- c. nilai penyelesaian pengawasan insidental

Formula :

$$X = \frac{a + b + c}{3}$$

Keterangan :

X : Nilai pengawasan pelaku usaha kelautan

a : Nilai penyelesaian pengawasan rutin OSS

b : Nilai penyelesaian pengawasan rutin selain OSS

c : Nilai penyelesaian pengawasan insidental

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 26. Tahapan pemeriksaan IKU 7

#### Pengawasan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Pengawasan Tahunan (5)</li> <li>• Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)</li> </ul>
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Pengawasan (30)</li> <li>• Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)</li> </ul>
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

#### Pengawasan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pengawasan tahunan (5)</li> <li>• Surat tugas (5)</li> <li>• Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)</li> </ul>
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara pengawasan</li> </ul>
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

## Pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat atau laporan aduan masyarakat atau nodin dari DJPRL/DJPK (7,5)</li> <li>• Surat tugas (7,5)</li> </ul>
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara pengawasan</li> </ul>
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pada tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan memiliki target IKU Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan sebesar 82. Untuk capaian Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan sebesar 100. Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Capaian tahun 2025 sangat baik sebagaimana capaian tahun sebelumnya. Pada tahun Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja tahun 2021-2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26. Capaian IKU 7

Indikator Kinerja			Target			Realisasi			
			2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Nilai	kualitas	pengawasan sumber daya kelautan	82	100	100	100	100	100	-

Tabel 27. Perbandingan IK 7 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.4	Terselenggara nya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	IKU 7 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

**Analisa penyebab keberhasilan** yang dilaksanakan Stasiun PSDKP Belawan agar mendapatkan capaian yang sempurna dalam memenuhi IKU dimaksud antara lain:

1. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Mengumpulkan informasi pendahuluan, yang bertujuan agar meminimalisir masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan misanya lokasi unit usaha, transportasi yang akan digunakan, potensi persoalan yang timbul karena pengawasan;

3. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, dengan internalisasi peraturan maupun kebijakan terbaru yang berkaitan dengan objek pengawasan;
4. Melakukan *sharing session* dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan agar pelaksanaan pengawasan lebih professional dan bertanggungjawab;
5. Segera melakukan pulbaket terkait laporan yang masuk, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat serta menambah target pengawasan insidental yang dilaksanakan;
6. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja, agar pelaksanaan pengawasan terstruktur serta pengukuran kinerja dapat terlaksana.

Adapun kendala dalam melaksanakan IKU Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan antara lain:

1. Wilayah pengawasan yang jauh;
2. Kurangnya informasi pendahuluan terkait objek yang diawasi;
3. Adanya perbedaan persepsi terkait peraturan yang berlaku;
4. Benturan tradisi dengan peraturan yang masih perlu dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun jalur keagamaan.

**Analisa kegiatan lain yang menunjang** pencapaian yaitu:

1. Briefing rutin yang dilakukan sebagai upaya dalam meneruskan informasi serta teknis pengawasan maupun isu terkini di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, sehingga distribusi informasi menjadi merata dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan optimal;
2. Perencanaan dan penganggaran, kegiatan tersebut erat kaitannya dengan capaian organisasi mengingat alokasi anggaran terhadap kebutuhan pengawasan dan yang menunjang pengawasan perlu direncanakan dan ditetapkan dengan perhitungan yang sesuai.

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 334,202,665,- atau 98,24% dari pagu sebesar Rp. 340,203,000,-

Tabel 28. Perhitungan Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan TW IV Tahun 2025

No	Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Tanggal Pelaksanaan	Persiapan (15)	Pelaksanaan (65)	Pelaporan (20)	TOTAL
					ST	Berita Acara Pengawasan	Laporan	
1	Pemanfaatan Ruang Laut	Insidental	PT. Perkebunan Sungai Wang	13 October 2025	15	65	20	100
2	Produk dan Jasa Kelautan	Insidental	PT. KLK Dumai	20 October 2025	15	65	20	100
3	Produk dan Jasa Kelautan	Insidental	PT. Pelita Agung Agrindustri Dumai	21 October 2025	15	65	20	100
								<b>100</b>

Pada TW IV Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan sebanyak 3 perusahaan dengan nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan 100.

Pada tahun 2025 rekapitulasi capaian pengawasan sumber daya kelautan adalah sebagai berikut :

- a. Capaian “Jumlah pemeriksaan pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut” telah terlaksana 13 kegiatan pengawasan dari target 9 kegiatan pengawasan;
- b. Capaian “Jumlah pemeriksaan pelaku usaha Pemanfaatan produk/jasa kelautan” telah terlaksana 7 kegiatan pengawasan dari target 3 kegiatan pengawasan;
- c. Capaian “Jumlah pemeriksaan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran” telah terlaksana 2 kegiatan pengawasan dari target 2 kegiatan pengawasan;

Tabel 29. Capaian Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Keterangan
					Ya	Tidak	
1	PT. Inti Benua Perkasatama	Terminal Khusus	jl. Raya Lubuk Gaung , Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Prov. Riau	(NIB) 8120108803912 PKKPRL, IZIN LINGKUNGAN	v		Pengawasan Rutin
2	PT. Inti Benua Perkasatama	Terminal Khusus	Jl. Datuk Laksamana, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Prov. Riau	(NIB) 8120108803912 PKKPRL, IZIN LINGKUNGAN	v		Pengawasan Rutin
3	PT. Agro Murni	Terminal Khusus	Jl. Ketam Putih, Kel. Tj. Penyembal, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Prov. Riau	(NIB) 8120015272905 PKKPRL,	v		Pengawasan Rutin
4	PT. Pertamina Parta Niaga	Submarine Pipeline	Jl. Samudera 1-2 Hageo Teungoh, Kota Lhoksumawe, Aceh	NIB 8120200840621, PKKPRL No 01022410511100014, Izin Pengelolaan dan Operasional TUKS, PB- UMKU, PKKPR, KLHK	v		Pengawasan Rutin
5	PT. Pertamina Parta Niaga	Submarine Pipeline	Jl. Samudera 1-2 Hageo Teungoh, Kota Lhoksumawe, Aceh	NIB 8120200840621, PKKPRL No 01022410511100013, Izin Pengelolaan dan Operasional TUKS, PB- UMKU, PKKPR, KLHK	v		Pengawasan Rutin
6	PT. Pertamina Parta Niaga	Submarine Pipeline	Jl. Samudera 1-2 Hageo Teungoh, Kota Lhoksumawe, Aceh	NIB 8120200840621, PKKPRL No 21112210511100006, Izin Pengelolaan dan Operasional TUKS, PB- UMKU, PKKPR, KLHK	v		Pengawasan Rutin
7	PT. Pertamina Parta Niaga	Submarine Pipeline	Jl. Samudera 1-2 Hageo Teungoh, Kota Lhoksumawe, Aceh	NIB 8120200840621, PKKPRL No 17102410511100003., Izin Pengelolaan dan Operasional TUKS, PB- UMKU, PKKPR, KLHK	v		Pengawasan Rutin
8	PT SEMEN PADANG	Terminal Khusus	Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Bangsal Aceh, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau	(NIB) 9120504990821PKKPRL No 17102410511100003., Izin Pengelolaan dan Operasional TUKS, PB- UMKU, PKKPR, KLHK	v		Pengawasan Rutin
9	PT. PLN Indonesia Power	Terminal Khusus	Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Sumatera Utara	(NIB) 8120205840413 PKKPRL 18032410511200026 Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Izin Operasional Tersus (IUPPLTU)	v		Pengawasan Rutin
10	Sri Hartati	Pemanfaatan Ruang Laut	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA	-		v	Pengawasan Insidental
11	BAPAK RAMLI RISYAT	Pemanfaatan Ruang Laut	KABUPATEN ACEH TIMUR	-		v	Pengawasan Insidental

12	CV. Maulana Creasindotama	Pemanfaatan Ruang Laut	KECAMATAN SUNGAI APIT, KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU	-	v	Pengawasan Insidental
13	PT. Perkebunan Sungai Wang	Pemanfaatan Ruang Laut	KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA	-	v	Pengawasan Insidental

Tabel 30. Capaian kegiatan pemeriksaan pelaku usaha Pemanfaatan produk/jasa kelautan

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan		Keterangan
					Ya	Tidak	
1	PT. Inti Benua Perkasatama (IBP)	Multiusaha mayoritas bergerak di bidang minyak kelapa sawit (termasuk penampungan dan penyaluran air baku)	Jalan Raya Lubuk Gaung, Desa/Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau	NIB 8120108803912, PKKPR nomor: 19102310511400006 izin lingkungan izin pemanfaatan ALSE	v		Pengawasan Rutin
2	PT. Inti Benua Perkasatama (IBP)	Multiusaha mayoritas bergerak di bidang minyak kelapa sawit (termasuk penampungan dan penyaluran air baku)	Komplek Pelabuhan PELINDO, Jl. Datuk Laksamana, Kel. Buluh Kasap, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau	NIB 8120108803912, PKKPR nomor: 04102410511400001 izin pemanfaatan ALSE dengan nomor: 81201088039120002	v		Pengawasan Rutin
3	PT. Agro Murni	Multiusaha mayoritas bergerak di bidang Pengolahan kelapa sawit (termasuk penampungan dan penyaluran air baku sebagai usaha pendukung)	Jalan Ketam Putih, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau	NIB 8120015272905 PKKPR nomor: 28022310511400005 Izin Lingkungan, Izin ALSE Nomor 81200152729050010	v		Pengawasan Rutin
4	PT. SARI DUMAI SEJATI	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau	NIB 8120109962403, PKKPR Nomor 05082410511400002		v	Pengawasan Insidental
5	PT. SEMESTA ALAM PERMAI	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Jalan PU Lama, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau	NIB 8120116032192, PKKPR Nomor 11122410511400004,		v	Pengawasan Insidental
6	PT. KLK Dumai	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Jl. Datuk Laksamana, Kawasan Pelindo I, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau	NIB 8120200981144, PKKPR Nomor 25062510511400003,		v	Pengawasan Insidental
7	PT. Pelita Agung Agrindustri Dumai	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Jl. Datuk Laksamana, Komplek Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Dumai, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau.	NIB 8120106950259,		v	Pengawasan Insidental

Tabel 31. Capaian kegiatan pemeriksaan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	Ketaatan	
					Ya	Tidak
1	PT. ANUGERAH ALAM INDUSTRI	Unit Pengolahan Ikan	PT. ANUGERAH ALAM INDUSTRI, Jl. Jala IV Nomor 32, Lingk. III, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan	NIB 91202042000489 PKKPR, IMB, UKL/UPL	v	
2	PT. Seafood Samudera Pasific	Unit Pengolahan Ikan	PT. Seafood Samudera Pasific (SSP), Jl. Titi, Pahlawan No.38 Desa/Kelurahan Rengas Pulau, Kec.Medan Marelan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara	NIB: 8120002962402 PKKPR, IMB, UKL/UPL, Izin Lingkungan	v	

Tabel 32. Data Rekapitulasi Jumlah Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan

No	Indikator Kinerja	Realisasi TW IV Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025
1	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	13
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	7
3	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0	2
<b>Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan</b>		<b>3</b>	<b>22</b>

Pengawasan dilaksanakan secara rutin maupun insidental dengan menggunakan longboat atau dengan kunjungan yang dapat diakses melalui perjalanan darat. Pengawasan perlu ditingkatkan dengan upaya komunikatif maupun dengan langkah sanksi administratif.

##### 5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

Sasaran Kegiatan keempat menghasilkan 1 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan yaitu **Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan** lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan. Kondisi ini berbeda dengan penetapan perjanjian kinerja pada tahun 2024. Penjabaran sasaran kegiatan pada 1 indikator kinerja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi Stasiun PSDKP Belawan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan pelaku usaha kelautan.

###### a. IKU 8 : Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan

Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya.

1. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsector perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan;

dan 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat)

2. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan.

3. Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa;

4. Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah perbandingan jumlah pelaku usaha yang telah menjalankan rekomendasi pembinaan/perbaikan dengan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan. Jika tidak ada pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi pembinaan/perbaikan, maka nilainya adalah 100.

5. Rekomendasi pembinaan / perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan.

FORMULA PERHITUNGAN

$$Y_{kpsdp} = \frac{X_{psp} + X_{ppus}}{2}$$

$Y_{kpsdp}$  : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan

$X_{psp}$  : Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur

$X_{ppus}$  : Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan

$$x_{psp}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha}}$$

Nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)

2	Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Pelaporan	20	Laporan kepatuhan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan pelaku usaha yang disampaikan tepat waktu
<b>JUMLAH</b>		100	

Capaian pengawasan sumberdaya perikanan pada TW IV Tahun 2025 yaitu melakukan pengawasan ikan yang dilindungi ke 4 perusahaan.

Pada tahun 2025, IKU ini dapat dicapai Stasiun PSDKP Belawan dengan Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan sebesar 100, dimana target IKU Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan sebesar 82.

Dalam melaksanakan pengawasan yang mendukung IKU ini pengawas perikanan berpedoman kepada Perdirjen 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Perdirjen tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan IKU nilai kualitas pengawasan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan secara teknis, dan terdapat berbagai peraturan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan yang erat hubungannya dengan IKU nilai kualitas pengawasan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Capaian dapat diraih dengan memenuhi tahapan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas. Berikut kami tampilkan capaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33. Pengawasan sumber daya perikanan di TW IV Tahun 2025

No	Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Persiapan (10)	Pelaksanaan (70)	Pelaporan (20)	TOTAL
			Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha	Berita Acara Pengawasan	Laporan	
1	Jenis Ikan Dilindungi	PT. Sukses Arwana Sumarindo	10	70	20	100
2	Jenis Ikan Dilindungi	CV. Sumber Lestari Alam	10	70	20	100
3	Jenis Ikan Dilindungi	PT. Salmah Arowana Lestari	10	70	20	100
4	Jenis Ikan Dilindungi	CV. Riau Arwana	10	70	20	100
						<b>100</b>

Tabel 34. Capaian IKU 8

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	100	100	100	100	100	-

Tabel 35. Perbandingan IK 8 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.4	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	IKU 7 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instrumen pengawasan. Indikator kinerja ini memberikan batasan sehingga pengawasan yang merupakan tujuan utama dari organisasi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tidak hanya merujuk kepada kaidah pengawaan akan tetapi tertib dalam pengadministrasian.

#### **Analisa penyebab keberhasilan** diantaranya;

1. Melengkapi Pengawas Perikanan dengan sarana dan pengawasan yang memadai dalam menjalankan tugas sehingga tugas menjadi optimal, semisal penggunaan vernier caliper, alat transportasi, kamera bawah air, dll;
2. Membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar, hal ini dimaksudkan pengawas perikanan harus memiliki kemampuan verbal yang baik sehingga penyampaian pesan dan maksud serta tujuan pengawasan dapat dipahami dengan baik, serta meminimalisir konflik mengingat kegiatan pengawasan berpotensi mewajibkan pengawasan perikanan berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai latar belakang;
3. Melakukan rapat perencanaan yang baik terkait objek pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan informasi dan persiapan telah ditetapkan pada saat kegiatan perencanaan;
4. Mengumpulkan informasi pendahuluan yang bersumber dari kegiatan pengawasan sebelumnya ataupun dari informasi yang telah dikumpulkan pengawas perikanan dari masyarakat atau dari dinas terkait tentang unit yang akan diawasi;
5. Melakukan pemantapan terhadap peraturan yang berhubungan langsung dengan objek pengawasan, seperti internalisasi regulasi maupun kebijakan terbaru yang telah ditetapkan;
6. Melakukan sharing session dengan dinas terkait guna menyamakan persepsi dan penguasaan kondisi terhadap objek pengawasan sehingga tidak ada benturan ketika pengawasan dilaksanakan;
7. Memenuhi tahapan pelaksanaan sebagaimana yang termuat dalam informasi indikator kinerja. Pelaksanaan kegiatan pengawasan juga dihadapkan dengan berbagai masalah yang menghambat diantaranya:

1. Masih terdapat kendala dalam pelayanan secara online;
2. Masih banyak stakeholder yang belum familiar dengan penggunaan aplikasi online dalam pelayanan.

**Analisa kegiatan yang menunjang** dalam pencapaian IKU ini diantaranya;

1. Pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi terkait regulasi terkini, serta isu terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Melakukan perencanaan dan revisi atas perubahan kegiatan atau adanya penambahan yang sifatnya urgent.

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 233,099,000,- atau 98,24% dari pagu sebesar Rp. 340,203,000,-

Pada tahun 2025 rekapitulasi capaian pengawasan sumber daya perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Nilai pelaku usaha perikanan yang ditindaklanjuti Tahun 2025

No	Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Jenis Rekomendasi	Tindak Lanjut	TOTAL
1	Importasi	PT ARTHA MAJU GEMILANG	Sanksi	Surat Peringatan	100
2	Importasi	CV BAHAGIA	Sanksi	Teguran Tertulis	100
3	Jenis Ikan Dilindungi	CV. Sumber Lestari Alam	Sanksi	Tahap Ekspose	100
4	Pembudidaya Ikan	Edi Santoso	Pembinaan dan Perbaikan	Surat Permohonan Pembinaan dan Perbaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Setempat	100
5	Pembudidaya Ikan	Tri Miswanto	Pembinaan dan Perbaikan	Surat Permohonan Pembinaan dan Perbaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Setempat	100
6	Pembudidaya Ikan	H.Iskandar	Pembinaan dan Perbaikan	Surat Permohonan Pembinaan dan Perbaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Setempat	100
					<b>100</b>

### 1. Nilai kualitas pengawasan kapal penangkap ikan

Pada TW IV Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan melakukan pelayanan terhadap penerbitan SLO. Selama kurun waktu Tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah menerbitkan SLO untuk 950 kapal perikanan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37. Rekapitulasi Penerbitan SLO

No	UPT/Satwas/Wilker PSDKP	CAPAIAN TAHUN 2025					
		PIT			NON PIT		
		TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL	TAAT	TIDAK TAAT	TOTAL
1	Stasiun PSDKP Belawan	273	6	279			-
2	Satwas PSDKP Rokan Hilir (Bagan Siapiapi)			-	14		14
3	Kabupaten Bengkalis (P. RUPAT)			-	13		13
4	Kabupaten Kepulauan Meranti	6		6	1		1
5	Kabupaten Rokan Hilir (PANIPAHAN)			-	90		90

6	Wilayah Kerja PSDKP Kota Dumai			-	6		6
7	Satwas PSDKP Langsa			-	23		23
8	Kabupaten Aceh Timur (IDI)	18		18	213		213
9	Kota Lhokseumawe (PUSONG)			-	65	1	66
10	Kabupaten Bireuen (Peudada)			-	25		25
11	Kabupaten Aceh Utara (Kreung Mane)			-	21		21
12	Kabupaten Pidie			-	37		37
13	Kabupaten Pidie Jaya			-			-
14	Satwas PSDKP Asahan	102	7	109	441	-	441
15	Kabupaten Batu Bara	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>399</b>	<b>13</b>	<b>412</b>	<b>949</b>	<b>1</b>	<b>950</b>

Selain penerbitan SLO di atas, pada TW IV Tahun 2025 stasiun PSDKP Belawan tidak melaksanakan pengawasan karena telah memenuhi target ditriwulan sebelumnya. Adapun hasil pengawasan dapat di lihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 38. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Kapal Perikanan

<b>NAMA PELAKU USAHA</b>	<b>HASIL PENGAWASAN</b>	<b>JENIS PENGAWASAN</b>
TJOAN TJAI ALIAS MANAN	Dokumen perizinan lengkap, sesuai peraturan perundang-undangan, dan masih berlaku pada saat kegiatan pengawasan ini dilaksanakan. Nilai kepatuhan teknis sebesar 82 % (baik sekali).	OSS
JONNER SIMANGUNSONG	Dokumen perizinan lengkap sesuai dengan perundang-undangan, dan masih berlaku pada saat kegiatan pengawasan ini dilaksanakan. Nilai Kepatuhan teknis sebesar 80% (baik sekali)	OSS
TAN PENG HUI	1. Pelaku usaha telah memenuhi kewajiban perizinan berusaha 2. Pelaku usaha telah melakukan pelunasan PNPB pasca produksi 3. SDM (Nakhoda dan KKM) Belum OSS memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.	OSS
FLORENCE ANGELINE	1. Analisa kepatuhan teknis: Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Baik Sekali 2. Usaha telah dilengkapi dokumen perizinan usaha sesuai ketentuan 3. Kode proyek yang diperiksa merupakan kode proyek untuk Kapal KM. SURYA – 6 dengan izin usaha yang berlaku sampai 31 Desember 2024. Kapal Surya 6 telah memperpanjang izin usaha yang berlaku sampai 31 Desember 2025	OSS

## 2. Nilai Kualitas Pengawasan Pembudidayaan Ikan

Pada TW IV Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan tidak melakukan pemeriksaan pelaku usaha pembudidayaan ikan karena telah terpenuhi di TW III Tahun 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha pembudidayaan selama Tahun 2025 pada tabel 15 berikut :

Tabel 39. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Tahun 2025

<b>NAMA PELAKU USAHA</b>	<b>HASIL PENGAWASAN</b>	<b>JENIS PENGAWASAN</b>
Edi Santoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum memiliki perizinan berusaha berupa NIB sebagai identitas dan legalitas dalam menjalankan usaha</li> <li>- TL pembinaan ke Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka perbaikan / fasilitasi pembuatan perizinan berusaha</li> </ul>	ATENSI PIMPINAN
Tri Miswanto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum memiliki perizinan berusaha berupa NIB sebagai identitas dan legalitas dalam menjalankan usaha</li> <li>- TL pembinaan ke Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka perbaikan / fasilitasi pembuatan perizinan berusaha</li> </ul>	ATENSI PIMPINAN
H. Iskandar	- Penilaian Pelaku Usaha Teknis KBLI 3251 (Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau) sebesar 63,5 ( Baik )	ATENSI PIMPINAN

## 3. Nilai Kualitas Pengawasan Distribusi dan Importasi Hasil Perikanan

Pada TW IV Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan melakukan pemeriksaan 1 pelaku usaha distribusi dan importasi hasil perikanan.

Tabel 40. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Importasi TW IV Tahun 2025

No	Unit Kerja yang melakukan pemeriksaan	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan/ Kelompok	Nama Pelaku Usaha/ Penanggungjawab	Jenis Pengawasan	Kepatuhan Pelaku Usaha	Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan
12	Stasiun PSDKP Belawan	18/11/2025	CV BAHAGIA		Importasi Komoditas Perikanan	Sanksi	SANKSI

Adapun hasil pemeriksaan terhadap distribusi dan importasi hasil perikanan selama Tahun 2025 pada tabel berikut :

Tabel 41. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Importasi Tahun 2025

No	Unit Kerja yang melakukan pemeriksaan	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan/ Kelompok	Nama Pelaku Usaha/ Penanggung jawab	Jenis Pengawasan	Kepatuhan Pelaku Usaha	Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan
1	Stasiun PSDKP Belawan	28/04/2025	PT GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	Haddad Alwi Sinaga	Pengolahan Hasil Perikanan	PATUH	
2	Stasiun PSDKP Belawan	24/06/2025	PT AQUA FARM NUSANTARA	TRI DHARMA SAPUTRA	Pengolahan Hasil Perikanan	PATUH	

3	Stasiun PSDKP Belawan	26/06/2025	ZAHID IMRAN INTERNATIONAL	Nn	Pemasaran Hasil Perikanan		
4	Stasiun PSDKP Belawan	20/05/2025	PT ARTHA MAJU GEMILANG	Indra Wibawa	Importasi Komoditas Perikanan	TIDAK PATUH	SANKSI
5	Stasiun PSDKP Belawan	18/11/2025	CV BAHAGIA		Importasi Komoditas Perikanan	TIDAK PATUH	SANKSI

#### 4. Nilai Kualitas Pengawasan Unit Pengolahan Ikan

Pada TW IV Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan tidak melakukan pemeriksaan pelaku usaha unit pengolah ikan karena telah terpenuhi di TW II Tahun 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha pembudidayaan selama Tahun 2025 pada tabel berikut :

Tabel 42. Rekapitulasi Pengawasan Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan Tahun 2025

No	UPT yang melakukan pemeriksaan	Tanggal Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan/ Kelompok	Nama Pelaku Usaha/ Penanggung jawab	Total Scoring (%)	Analisa Hasil Pengawasan
1	STASIUN PSDKP BELAWAN	28/04/2025	PT GOLDEN SEAFOOD INDONESIA	Haddad Alwi Sinaga	78	Dokumen perizinan PT. Golden Seafood Indonesia lengkap dan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
2	STASIUN PSDKP BELAWAN	24/06/2025	PT AQUA FARM NUSANTARA	TRI DHARMA SAPUTRA	100	Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bahwa PT. Aquafarm Nusantara telah memenuhi persyaratan yang ada pada SKP dan menerapkan HACCP pada bidang usaha yang dilakukan.

#### 5. Nilai Kualitas Pengawasan Jenis Ikan Yang Dilindungi

Pada TW IV Tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan melakukan pemeriksaan terhadap 4 pelaku usaha jenis ikan yang dilindungi. Adapun hasil pemeriksaan terhadap pelaku usaha pembudidayaan dapat dilihat pada tabel 16 berikut :

Tabel 43. Tabel perhitungan Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan

No	Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Persiapan (10)	Pelaksanaan (70)	Pelaporan (20)	TOTAL
			Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha	Berita Acara Pengawasan	Laporan	
1	Jenis Ikan Dilindungi	PT. Sukses Arwana Sumarindo	10	70	20	100
2	Jenis Ikan Dilindungi	CV. Sumber Lestari Alam	10	70	20	100
3	Jenis Ikan Dilindungi	PT. Salmah Arowana Lestari	10	70	20	100
4	Jenis Ikan Dilindungi	CV. Riau Arwana	10	70	20	100
						<b>100</b>

Secara keseluruhan, Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2025 telah melakukan pengawasan sumber daya perikanan ke 19 pelaku usaha sebagai berikut :

Tabel 44. Rekapitulasi Pengawasan Sumber Daya Pengawasan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025
1	Jumlah Pelaku usaha pengawasan kapal penangkap ikan	4
2	Jumlah Pelaku usaha pengawasan pembudidaya perikanan	3
3	Jumlah Pelaku usaha pengawasan distribusi dan importasi perikanan	5
4	Jumlah Pelaku usaha pengawasan unit pengolah ikan	2
5	Jumlah Pelaku usaha pengawasan jenis ikan dilindungi	5
<b>Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan</b>		<b>19</b>

## 6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan

Sasaran kegiatan ini merupakan sasaran kegiatan yang berorientasi kepada peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan menurunkan 2 indikator kinerja utama, IKU tersebut antara lain:

- a. Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks);
- b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks).

### a. IKU 9: Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan peneraan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang pada UPT Stasiun PSDKP Belawan untuk;

1. peneraan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
2. peneraan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Indeks Peneraan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut:

FORMULA PERHITUNGAN :

## (1) Pengenaan Sanksi Administratif SPKP

$$x = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100\%$$

$x$	:	Pengenaan sanksi administratif SPKP
$\sum a$	:	Jumlah SPKP (LIP) yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan
$\sum b$	:	Jumlah SPKP (LIP) yang diterbitkan

## (2) Pengenaan Sanksi Administratif Non SPKP bidang Kelautan dan Perikanan

$$x = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100\%$$

$x$	:	Pengenaan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan
$\sum a$	:	Jumlah penetapan sanksi administratif non SPKP bidang kelautan dan perikanan
$\sum b$	:	Jumlah pelanggaran

Dari hasil penghitungan di atas, didapat satuan persentase yang kemudian masuk dalam nilai indeks dengan kriteria :

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai indeks 81 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total Stasiun PSDKP Belawan menyelesaikan 112 dari 112 kasus pengenaan administrasi yang terdiri dari 85 Kasus SPKP dan 25 Kasus Pelanggaran Perizinan. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 45. Capaian IKU 9

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	81	80	80	-	-	-

Tabel 46. Perbandingan IK 9 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA									
			Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuana	
SK.6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	IKU 9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	81	81	81	81	81	81	81	

Tabel 47. Rekap penerapan sanksi administratif

**Kolom A. Penerapan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan SPKP**

NO	UPT	JUMLAH	ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Penerapan Sanksi Administratif KP SPKP
			DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	
(1)	(2)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20) = (17+18)/(10-11-12-13-14)
1	Belawan	85	7	78	0	0	9	62	0	7	79,49%
	<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	

**Kolom B. Penerapan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP**

No	UPT	Sanksi Adm SDK					Sanksi Adm SDP				Capaian Penerapan Sanksi Administratif KP Non SPKP
		SP1	SP2	SP3	Paksaan Pemerintah	Denda	SP1	SP2	Paksaan Pemerintah	Denda	
1	BELAWAN	27	3	1		5	6			5	100%
	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

**Analisa penyebab keberhasilan IKU** dimaksud antara lain:

1. Melakukan internalisasi kepada setiap pengawas perikanan, awak kapal pengawas, maupun polsus PWP3K yang melaksanakan tugas agar professional dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku, internalisasi dilakukan secara internal sebagai bagian penguatan kompetensi dan sharing session;
2. Melakukan pemeriksaan secara teliti ketika melaksanakan pengawasan baik ketika kedatangan kapal, keberangkatan kapal, pengawasan perizinan berusaha maupun pemeriksaan ketika sedang melaksanakan gelar operasi.
3. Melaksanakan pengawasan dan penginformasian secara merata sehingga pendekatan persuasif telah dibangun sebagai dasar penetapan sanksi administrasi dikemudian hari apabila ditemukan pelanggaran;
4. Memasang jaringan informasi eksternal yang berkontribusi sebagai laporan awal adanya pelanggaran;

Kegiatan pengenaan sanksi administratif selama tahun 2025 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 41,359,306,- atau sekitar 93.92% dari total pagu Rp. 44,037,000,-.

**b. IKU 10: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)**

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh:

- a) Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili;
- b) Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berStasiun; atau;
- c) Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Formula :

$$X_{TLH} = \sum_{i=1} \frac{(X1+X2+XN)}{n} \times 100\%$$

- $x_{TLH}$  : Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisa Pemantauan SDKP;  
 $X1 + X2 + XN$  : Jumlah Pelanggaran yang dilakukan tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi (SP1, SP2 dan denda administarsi) dan bukan pelanggaran;  
 $n$  : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

Tabel 48. Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)										ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP	
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	POACHING	SIPIEXPIRED	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	%	Kriteria indeks (melihat tabel)		
																				(1)	(2)
1	Belawan	0	6	4	71	0	4	0	85	7	78	0	0	9	62	0	7	91,76%	81		
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>91,76%</b>	<b>81%</b>		

Pada TW IV tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan memperoleh nilai indeks 81 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas. Total Stasiun PSDKP Belawan menyelesaikan 85 dari 85 kasus tindak lanjut hasil pemantauan SPKP. Berikut kami sajikan tabel capaian dan tabel rekapannya.

Tabel 49. Capaian IKU 10

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
<b>Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)</b>	81	81	80	80	-	-	-

Tabel 50. Perbandingan IK 10 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahun
<b>SK.6</b>	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	IKU 10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	81	81	81	81	81	81	81	81

**Analisis penyebab keberhasilan** disebabkan antara lain:

1. Stasiun PSDKP Belawan menindaklanjuti dengan melaksanakan BAP kepada pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu;
2. Stasiun PSDKP Belawan menyurati UPT Stasiun PSDKP lainnya yang merupakan tempat dimana pemilik kapal terindikasi melakukan pelanggaran berdomisili. Surat tersebut dimaksudkan agar

Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan bantuan dari UPT PSDKP lainnya sebagai mediator agar kegiatan BAP dapat dilaksanakan;

Indikator kinerja ini memerlukan perhatian ekstra untuk dapat diselesaikan mengingat dugaan pelanggaran yang setiap hari akan bertambah dan kedudukan kapal ketika berlabuh belum tentu pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Keterlibatan UPT lain juga sangat membantu walaupun sebenarnya belum bisa berjalan dengan optimal mengingat tidak tercapainya waktu yang ideal bagi kedua belah pihak melakukan BAP dikarenakan perbedaan waktu dan UPT PSDKP mitra juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Analisa kegiatan yang menunjang** tercapainya indikator kinerja dimaksud adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan tindak lanjut kapal yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Mengingat dugaan pelanggaran setiap harinya terus bertambah maka berdasarkan evaluasi internal maka Stasiun PSDKP Belawan secara kontinu terus melakukan pemanggilan klarifikasi maupun menyurat kepada UPT PSDKP lainnya agar membantu sebagai mediator terlaksananya proses BA permintaan keterangan.

## 7. Sasaran kinerja 7 : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yaitu Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025.

### a. IKU 11 : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$x = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100\%$$

$x$	:	Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
$\sum a$	:	Jumlah kasus di tahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun di atasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit
$\sum b$	:	Jumlah kasus penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di tahun berjalan

Sebagai catatan tambahan dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut;

- (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.
- (3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit diakhir bulan perhitungan triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada triwulan berikutnya.
- (4) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

Pada TW IV tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan telah menyelesaikan 3 kasus dengan Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan memperoleh nilai indeks 81 atas IKU ini berdasarkan perhitungan di atas.

Tabel 51. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)

Perkara	Tahun 2025		Capaian Tahun 2025 (%)	Kategori Indeks (Nilai)
	Total Kasus	Kasus Selesai		
Stasiun PSDKP Belawan	3	3	100%	81

No	Nama Kapal	Proses Peyidikan	Capaian
1	KM. SLFA 5210	Inckracht	100
2	KM. SLFA 4584	Inckracht	100
3	KM. PKFB 1066	Inckracht	100
<b>PERSENTASE</b>			<b>100</b>

Tabel 52. Capaian IKU 11

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
<b>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)</b>	81	81	100	93	93	-	-

Tabel 53. Perbandingan IK 10 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahun
<b>SK.7</b>	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	IKU 10 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	81	81	81	81	81	81	81	81

**Analisa penyebab keberhasilan** IKU ini antara lain adalah:

- Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki jumlah personal PPNS yang memadai yang berperan aktif dalam penyelesaian TPKP di lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
- Sinergitas antara pengawas perikanan dan POLSUS PWP3K dengan PPNS masih terbina dengan baik sehingga proses dan alur TPKP dapat terjaga dengan baik;
- Tim kerja PP dapat mengoptimalkan semua sumber daya baik PPNS dan NON PPNS dalam menyelesaikan TPKP dimulai dari mindik, barbuk, saksi, pelaku, dan semua aspek yang terkait dalam penyidikan;
- Pendekatan kekeluargaan yang digunakan dalam manajemen konflik antara tersangka dan keluarga dapat dicari pemecahan masalah yang terbaik.
- Bentuk dari hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Belawan dengan penegakan Hukum terkait seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Belawan dan *stakeholder* lainnya seperti Saksi Ahli, sehingga dalam proses penanganan perkara lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilaksanakan.

Adapun **analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan** adalah:

- Perhitungan kebutuhan SDM, pendelegasian, dan penjurusan pegawai yang dilakukan Stasiun PSDKP Belawan dengan mendistribusikan staffnya dalam keikutsertaan sebagai Pengawas Perikanan, Pengawas Kelautan, Polsus, dan PPNS terbukti berjalan baik dalam mengganti kekosongan personil dikarenakan mutas, maupun pemekaran organisasi sebelumnya sehingga kebutuhan aparat penegak hukum dalam organisasi tidak mengalami penurunan ataupun kekosongan;
- Perencanaan terhadap kebutuhan anggaran menjadi salah satu point yang menunjang hampir setiap aspek kinerja termasuk dalam TPKP. Perhitungan akan kebutuhan anggaran atau revisi terhadap kebutuhan menjadi jantung dalam keberhasilan kegiatan yang terkait erat dengan kebutuhan anggaran.

Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2025 mendapat pagu sebesar Rp. 80,450,000,- untuk penyidikan TPKP, dan realisasi anggaran sebesar Rp. 80,391,976,- atau sebesar 99,93%.

## **8. Sasaran kinerja 8: Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**

Sasaran kinerja ini menurunkan 10 indikator kinerja yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Belawan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. 10 indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang melekat pada kegiatan penatausahaan dan merupakan kerja administrasi keseharian. 10 indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
3. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;

4. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Resiko Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
6. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah dilengkapi dan disampaikan;
7. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
9. Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan;
10. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Selama kurun waktu Triwulan IV Stasiun PSDKP Belawan melakukan penilaian terhadap 10 dan ada indikator kinerja manajerial yang dinilai secara triwulan yaitu point 5,6 dan 7.

**a. IKU 12 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Belawan**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut

**FORMULA PERHITUNGAN :**

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

- NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
- CRO : Capaian RO
- PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
- NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi
- WCRO : Bobot Capaian RO
- WpenggaraanSBK : Bobot Penggunaan SBK
- WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah menargetkan IK 12 sebesar 71,5 dengan capaian sebesar 90,83.

Tabel 54. Capaian NKPA Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2025

No	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektifitas	Efisiensi	
1	Stasiun PSDKP Belawan	90,83	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
			100	83,33	50

Tabel 55. Capaian IK 12

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	71,5	90,83	84,49	-	-	-	-

Tabel 56. Perbandingan IK 12 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuana
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 12 Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	90,83	90,09	89,77	89,50	89,41	89,62	89,66	84,16

Adapun **analisa penyebab keberhasilan** adalah:

1. CRO Stasiun PSDKP Belawan yang melebihi target, dalam realisasi RO Stasiun PSDKP Belawan telah optimal melaksanakan kegiatan yang efektif sehingga capaian yang dihasilkan lebih optimal;
2. Perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 pada Stasiun PSDKP Belawan telah sesuai dengan ketentuan perhitungan yang berlaku.

**Analisa kegiatan yang menunjang** monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap RO dan mengoptimalkan kinerja baik terhadap kegiatan utama dan manajerial. Berikut kami sampaikan capaian NKPA Stasiun PSDKP Belawan dalam bentuk tabel.

#### **b. IK 13 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU IKPA adalah 1). Pengukuran Capaian IKU IKPA dilakukan pada semester I dan II; 2). Penarikan Data Capaian IKPA H-1 batas waktu *close* penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan langkah-langkah akhir tahun berjalan yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

### FORMULA PERHITUNGAN :

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2025 sebesar 93,66. Secara rinci capaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	76.73	92.89	93.33	100.00	92.43	100.00	93.66	100%	0.00	93.66
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	11.51	18.58	9.33	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	88.37		94.66				100.00				

Tabel 57. Capaian IKU 13

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
<b>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan</b>	93,66	93,66	93,98	92,67	93,77	91,02	90

Tabel 58. Perbandingan IK 24 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Ponti anak	Kupang	Tarakan	Tahu na
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	93,66	97,80	95,35	95,17	94,58	95,41	94,42	95,41

Analisa keberhasilan IK :

- 1). Adanya monitoring dari Kepala Stasiun dan Kepala Urusan Umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan di Stasiun PSDKP Belawan;
- 2). Kesesuaian tahap pelaksanaan.

**c. IKU 14 : Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Belawan**

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

FORMULA PERHITUNGAN :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i

IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W<sub>1j</sub> \* R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W<sub>2k</sub> \* R<sub>2k</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W<sub>3l</sub> \* R<sub>3l</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W<sub>4m</sub> \* R<sub>4m</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

**Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan memperoleh capaian sebesar 84,89 dari target 81.**

Tabel 59. Capaian IK 13

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	81	84,89	90,97	87,76	82,17	81,27	76

Tabel 60. Perbandingan IK 163 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Pontianak	Kupang	Tarakan	Tahuana
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 16 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	84,89	84,16	87,68	87,72	86,91	82,82	86,73	84,59

**Analisa keberhasilan capaian ini adalah:**

1. Mengkomunikasikan dan mendelegasikan semua staff Stasiun PSDKP Belawan agar terlibat pada kegiatan yang mendukung dan memperbaiki kompetensi pegawai, baik secara daring maupun luring;
2. Melibatkan pimpinan dalam *controlling* peningkatan IP ASN yang esensinya adalah memenuhi kebutuhan pegawai dalam meningkatkan kapasitas diri dengan diklat 20 JP.

**Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan** ialah evaluasi capaian IP ASN pada semester I dan tahunan sehingga pimpinan dapat memantau progress kenaikan dan siapa saja yang belum melaksanakan diklat 20 JP.

**d. IKU 15 : Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Belawan**

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

**FORMULA PERHITUNGAN :**

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Dimana hasil pengukuran merupakan pemenuhan data LKE pada aplikasi kinerjaku dengan upload bukti dukung yang sesuai kriteria penilaian. Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai **87,25 dengan target 86.**

Tabel 61. Nilai Akuntabilitas Stasiun PSKP Belawan

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	STASIUN PSDKP BELAWAN	27.60	24.60	13.80	21.25	87.25	A

Tabel 62. Capaian IK 15

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100	-	-	-

Tabel 63. Perbandingan IK 15 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Ponti anak	Kupang	Tarakan	Tahuna
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 15 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	87,25	87,95	87,50	88,90	87,95	86,55	86,00	87,60

**Analisa keberhasilan** terhadap IKU ini dikarenakan

1. Pemenuhan data dukung sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Melakukan tindak lanjut terhadap koreksi ketika *self assessment*.

**Sedangkan analisa kegiatan yang menunjang** tercapainya IKU ini adalah

1. Kegiatan perencanaan kinerja Stasiun PSDKP Belawan, baik berupa dokumen maupun kegiatan rapat;
2. Kegiatan pengukuran, seperti penginputan capaian pada aplikasi kinerjaku, bukti asistensi penilaian;
3. Pelaporan kinerja Stasiun PSDKP Belawan;
4. Kegiatan evaluasi penilaian capaian kinerja;

**e. IKU 16 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (%)**

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko

dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- A = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan pengendalian resiko dan dipantau oleh tim sesdit terkait kelengkapan data dukung dan tahapan pengendalian. Capaian yang diperoleh Stasiun PSDKP Belawan **sebesar 100 dari target 100 di Triwulan III tahun 2025 sehingga pada triwulan IV tidak ada penambahan**. Pencapaian ini dikarenakan seluruh tahapan resiko pada Stasiun PSDKP Belawan telah dilaksanakan dan telah terdokumentasikan serta telah diverifikasi. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 64. Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
<b>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan</b>	100	100	85,45	82,15	-	-	87,75

Tabel 65. Perbandingan IK 16 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Ponti anak	Kupang	Tarakan	Tahun
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100	100	100	100	100

**Analisa penyebab keberhasilan** kegiatan ini antara lain:

1. Setiap tim kerja mengidentifikasi setiap skala resiko yang kemungkinan bisa terjadi dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam form kendali yang mendapat perhatian dan arah pimpinan;
2. Menentukan langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut;
3. Mengarsipkan dokumen manajemen resiko.

**Analisa kegiatan yang menunjang** keberhasilan adalah evaluasi, kegiatan organisasi berjalan seirama sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sebagai acuan kerja. Kegiatan yang sama akan berjalan terus sehingga peran evaluasi akan memberikan gambaran terhadap rencana dan pencegahan kedepan atas dasar evaluasi kegiatan sebelumnya.

**f. IK 17: Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan.**

Sebagai bentuk pengawasan dari APIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP maka telah dirumuskan IK "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Stasiun UPT PSDKP Belawan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan".

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) sebanyak **75%** dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum N_t$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2

$\sum N$  = Jumlah rekomendasi

Selama TW IV tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan memiliki rekomendasi hasil sebanyak 3 rekomendasi yang harus ditindak lanjuti. Sepanjang Tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas NOMOR 63/DJPSDKP.1/TU.140/I/202 tanggal 9 Januari 2026, Stasiun PSDKP Belawan telah menindaklanjuti 25 rekomendasi tersebut sehingga capaian Stasiun PSDKP Belawan untuk indikator kinerja dimaksud adalah 100%. Perhitungan capaian tahunan merupakan rata-rata capaian setiap triwulan yang dirata-ratakan. Capaian indikator kinerja ini kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 66. Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Target				Realisasi		
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	100	100	100	100	-	-

Tabel 67. Perbandingan IK 16 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Ponti anak	Kupang	Tarakan	Tahu na
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 16 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	100	100	100	100	100	100	100	100

**Analisa penyebab** keberhasilan yang mendukung capaian ini adalah mendelegasikan pihak yang bertanggung jawab jika terdapat rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dan pimpinan yang proaktif untuk memantau sejauh mana progress tindaklanjut sudah diselesaikan.

**Analisa kegiatan** yang menunjang adalah kegiatan monitoring internal setelah rekomendasi disampaikan, yang dipimpin langsung oleh kasubag umum agar tindak lanjut dapat segera disampaikan.

**g. IK 18: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan.**

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Formula:

Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021

Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:

U1-Persyaratan Layanan

U2-Kemudahan Prosedur

- U3- Waktu Penyelesaian
- U4-Kesesuaian Biaya
- U5-Kesesuaian Produk
- U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas
- U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas
- U8-Layanan Konsultasi
- U9-Kualitas Isi/Sarana

Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:

- >88,31 : Sangat Baik
- 76,61-88,30: Baik
- 65,00-76,60: Kurang Baik
- 25,00-64,99 : Tidak Baik

Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)

Berdasarkan Nota Dinas NOMOR 75/DJPSDKP.1/HP.430/I/2026 tanggal 12 Januari 2026, hasil Indeks kepuasan masyarakat Stasiun PSDKP Belawan pada TW IV 2025 memiliki target 80, sedangkan capaiannya sebesar 93,13 dari 123 responden yang merupakan pengguna jasa di seluruh unit kerja yang ada di Stasiun PSDKP Belawan serta memberikan pelayanan publik yang profesional kepada pengguna jasa.

Pengolahan dan penarikan data capaian berdasarkan aplikasi Sisusan yang didapat dari survey pengguna layanan. Capaian indikator kinerja ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar 93,13. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan Indikator kinerja baru dimulai pada tahun 2024. Berikut kami sampaikan tabel capaian perhitungan indikator kinerja dimaksud.

Tabel 68. Capaian IK 18

Indikator Kinerja	Target		Realisasi				
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	80	93,13	88,41	79	87,53	88,92	-

Tabel 69. Perbandingan IK 18 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Ponti anak	Kupang	Tara kan	Tahu na
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 18 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	93,13	94.64	100	91.85	95.18	94.4	86.33	92.95

**Analisa penyebab keberhasilan** pencapaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Pengawas perikanan sebagai garda terdepan dalam pelayanan SLO telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan UU dan telah memenuhi etika pelayanan publik sehingga pengguna jasa menerima manfaat pelayanan dengan baik;
2. Pengguna jasa telah mendapatkan fasilitas, yang nyaman selama bermitra baik dalam penggunaan aplikasi yang memudahkan seperti e-SLO ataupun ruang tunggu yang nyaman.

**Analisa kegiatan yang menunjang keberhasilan** antara lain

1. Perawatan Gedung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek yang secara langsung berdampak kepada kenyamanan para pengguna jasa;
2. Penggunaan aplikasi e-SLO yang mempermudah permohonan keberangkatan kapal perikanan;
3. Internalisasi nilai ASN Ber-AKHLAK kepada para Pengawas Perikanan dan Powsus PWP3K melalui kegiatan apel pagi sehingga memupuk kesadaran dan aktualisasi dalam melaksanakan pelayanan.

#### **h. IKU 19 : Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **FORMULA PERHITUNGAN :**

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
  - a. penciptaan arsip (25%),
  - b. penggunaan arsip (25%),
  - c. pemeliharaan arsip (25%)
  - d. penyusutan arsip (25%)

2. sumber daya kearsipan (bobot 50%)

a. sumber daya manusia kearsipan (50%),

b. prasarana dan sarana (50%)

Stasiun PSDKP Belawan memiliki target capaian IKU Nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 75. Penghitungan capaian Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan di TW IV tahun 2025. Berdasarkan Nota Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan NOMOR 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal 21 November 2025, capaian IKU Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebesar 80,81 dengan kategori A (memuaskan).

Tabel 70. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Belawan

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
59	Pangkalan PSDKP Tual	68.00	18.50	86.50	A (MEMUASKAN)	54	11
60	Pangkalan PSDKP Jakarta	66.40	18.50	84.90	A (MEMUASKAN)	67	12
61	Stasiun PSDKP Belawan	57.31	23.50	80.81	A (MEMUASKAN)	89	13
62	Stasiun PSDKP Kupang	61.66	18.50	80.16	A (MEMUASKAN)	94	14

Tabel 71. Capaian IK 14

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	75	80,81	81,48	-	-	-	-

Tabel 72. Perbandingan IK 14 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Ponti anak	Kupang	Tarakan	Tahu na
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 14 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80,81	92.50	87.90	92.50	92,5	80,16	87,83	87.50

**Analisa penyebab keberhasilan** antara lain:

- Stasiun PSDKP Belawan telah merapikan penataan arsip dengan kodefikasi yang rapi dan lebih tertata;
- Telah melakukan penertiban terhadap penomoran surat yang bersumber dari satu pintu;
- Aktif menyesuaikan kondisi arsip Stasiun PSDKP Belawan dengan ketentuan yang berlaku;

- Melakukan pemusnahan terhadap arsip yang tidak terpakai dengan maksud mengefisienkan gudang penyimpanan arsip.

**Analisa kegiatan yang menunjang** adalah kegiatan pembinaan dukungan manajemen berupa pengarahan yang dilaksanakan oleh kepala subbagian umum terkait pemenuhan kebutuhan organisasi.

**i. IK 20: Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)**

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi yang diterapkan adalah inovasi yang telah diterapkan pada unit kerja. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan adalah hasil penilaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan dengan aspek Kebaruan/Nilai tambah, implementasi, signifikansi/dampak, adaptabilitas, strategi keberlanjutan, sumber daya dan diseminasi.

Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan dihitung berdasarkan aspek Kebaruan/Nilai tambah(15%) , implementasi (15), signifikansi/dampak (30), adaptabilitas (10), strategi keberlanjutan (10), sumber daya (5) dan diseminasi (15). Penilaian Inovasi Pelayanan Publik dinilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian. Kategori nilai yaitu:

Nilai	Predikat
>89 – 100	Sangat Memuaskan
>80 – 89	Memuaskan
>70 – 79	Sangat Baik
>60 – 69	Baik
>50-60	Cukup
>30 – 50	Kurang
0 – 30	Sangat Kurang

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan memiliki target capaian sebesar 71. Pada tahun 2025, Stasiun PSDKP Belawan berhasil menghasilkan 1 buah inovasi pelayanan publik yang berjudul TERI MEDAN (sisTem E-Reservasi dan Informasi – manajeMEn Digital Antrian pemeriksaan kapal Perikanan). TERI MEDAN menjadi solusi atas keterbatasan informasi yang sebelumnya membuat pengguna harus menghubungi petugas berulang kali untuk menanyakan jadwal pemeriksaan kapal, status permohonan, dan petugas yang akan melakukan pengecekan di lapangan. Melalui TERI MEDAN, pemilik kapal kini dapat mengakses seluruh informasi secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor. Hal ini menurunkan pertanyaan langsung ke petugas hingga 85 persen serta meningkatkan transparansi dan

kepastian waktu pelayanan.

Berdasarkan Nota Dinas NOMOR 2119/DJPSDKP.1/TU.140/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025, Capaian Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan nilai 81,13, dimana nilai tersebut diatas target yang ditetapkan.

8	Pangkalan PSDKP Tual	SEDAP (Sistem Informasi Pengenaan Denda Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan)	84,72	UPT
9	Stasiun PSDKP Cilacap	Teman SLO (Sistem Terintegrasi dan Manajemen Informasi SLO)	83,77	UPT
10	Pangkalan PSDKP Lampulo	Qerapu+ (QR Pemeriksaan Kapal Perikanan Terpadu)	83,28	UPT
11	Pangkalan PSDKP Batam	GAHAR SPKP (Cegah Pelanggaran SPKP)	82,00	UPT
12	Stasiun PSDKP Belawan	TERI MEDAN (Sistem E-Reservasi dan Informasi - Manajemen Digital Antrian Pemeriksaan Kapal Perikanan)	81,13	UPT
13	Pangkalan PSDKP Jakarta	MASBRO PINTER (Message Broadcast Pelaku usaha Semakin tertib)	80,07	UPT
14	Stasiun PSDKP Tahuna	SIAPKAN (Sistem Informasi Barcode Kapal Perikanan)	79,73	UPT

Pada Tahun 2025, target Capaian Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan berupa Nilai. Sedangkan pada tahun 2021 – 2024, target Capaian Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan berupa jumlah inovasi yang dihasilkan.

Tabel 73. Capaian IK 20

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2021	Renstra
<b>Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)</b>	71	81,13	1	1	1	1	1

Dengan Capaian Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan mendapatkan nilai 81,13, Stasiun PSDKP Belawan menempati urutan ke 6 dibandingkan dengan UPT eselon 4 lainnya lingkup Ditjen PSDKP.

Tabel 74. Pebandingan IK 20 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan							
			Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Ponti anak	Kupang	Tarak an	Tahu na
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)	81,13	83,77	79,55	78,12	75,55	77,70	74,62	79,73

**Analisa penyebab keberhasilan** dari IK ini adalah komitmen dari seluruh pegawai Stasiun PSDKP Belawan untuk mengkampanyekan semangat pelayanan prima. Selain itu, pegawai Stasiun PSDKP Belawan cermat dalam mengidentifikasi masalah yang ada.

**j. IKU 21 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja**

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Target capaian Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2025 sebesar 70.

Berdasarkan Nota Dinas NOMOR 117/DJPSDKP.1/TU.140/I/2026 tanggal 15 Januari 2026, capaian Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebesar 81,37.

9	Pangkalan PSDKP Jakarta	81,87	
10	Pangkalan PSDKP Benoa	82,21	
11	Pangkalan PSDKP Bitung	77,67	
12	Pangkalan PSDKP Tual	77,59	
13	Stasiun PSDKP Belawan	81,37	
14	Stasiun PSDKP Cilacap	88,03	
15	Stasiun PSDKP Pontianak	77,25	
16	Stasiun PSDKP Kupang	78,85	

Tabel 75. Capaian IK 19

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			
	2025	2025	2024	2023	2022	2024	Renstra
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	70	81,37	75,11	25,34	26,67	75,11	-

Tabel 76. Perbandingan IK 19 antar UPT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Belawan	Cilacap	Biak	Ambon	Ponti anak	Kupang	Tarakan	Tahu na
SK.8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	IKU 19 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup UPT Stasiun PSDKP Belawan	81,37	88,03	82,70	78,94	77,25	78,85	81,20	81,20

**Analisa keberhasilan** indeks kinerja ini Adalah Internalisasi point budaya kerja dalam kegiatan organisasi baik dalam apel pagi maupun dengan kegiatan dan menjadi bagian sistem.

**Kegiatan yang mendukung tercapainya** indikator ini adalah

- Keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan yang mengimplementasikan budaya kerja;
- Memberikan reward bagi pegawai yang memahami nilai budaya kerja.

### C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2025 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja manajerial dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator kinerja. Adapun capaian Stasiun PSDKP Belawan bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja triwulan IV tahun 2025 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

Tabel 77. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT Setara/sejenis Triwulan IV tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian TW IV							
		Biak	Ambon	Tahuna	Kupang	Tarakan	Cilacap	Pontianak	Belawan
1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	82	82	82	82	82	82	82	82
2	Indeks Operasi Kapal Pengawas	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	95,69
3	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	97,50	83,69	97,50	95,00	95,83	92,19	93,00	95,00
4	Persentase Pemeliharaan Dan Perawatan Prasarana Dan Sarana Pengawasan SDKP	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Akurasi Dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan	81	81	81	81	81	81	81	81
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	81	81	81	81	81	81	81	81
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan	81	81	71	81	81	81	81	81
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Pontianak	89,77	89,50	84,16	89,62	89,66	90,09	89,41	90,83
13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	95,35	95,17	95,41	96,37	94,42	97,80	94,58	93,66
14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	87,68	87,72	84,59	82,82	86,73	84,16	86,91	84,89
15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Pontianak	87,50	88,90	87,60	86,55	86,00	87,95	87,95	87,25
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100	91,85	92,95	94,4	86,33	94,64	95,18	93,13
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	87,90	92,50	87,50	80,16	87,83	92,50	92,5	80,81
20	Nilai Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Stasiun PSDKP Pontianak	79,55	78,12	79,73	77,70	74,62	83,77	75,55	81,13
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	82,70	78,94	81,20	78,85	81,20	88,03	77,25	81,37

## D. Efisiensi

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada Stakeholder, Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal sampai Triwulan IV Tahun 2025. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Efisiensi pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan tahun 2025 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut:

1. Pelaporan kegiatan realtime via WA Group Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara realtime melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.
2. Pengurangan belanja bahan, pencetakan dan konsumsi Dengan adanya platform portal.kkp.go.id dimana kegiatan persuratan dilaksanakan secara digital, menjadi alternatif untuk publikasi laporan kegiatan dan laporan kinerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Jumlah laporan yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan selebihnya didistribusikan melalui portal.kkp.go.id yang setiap pegawai memiliki akses kegiatan tersebut.
3. Optimalisasi penggunaan media daring Pada tahun 2024 Stasiun PSDKP Belawan selalu memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan seperti untuk rapat, supervisi, bimbingan teknis lingkup Stasiun PSDKP Pontianak salah satunya melalui zoom meeting.
4. Pemanfaatan Google Drive  
Google drive merupakan layanan penyimpanan online (cloud), memudahkan pengguna untuk penyimpanan file melalui internet. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Belawan masih menggunakan google drive untuk penyimpanan data kinerja. Hal tersebut sebagai perwujudan satu data lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Dengan adanya penyimpanan secara online semakin memudahkan setiap urusan memperbaharui data kapan saja dan dimana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja pada penyimpanan, akses untuk pengelola hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Belawan.

## E. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2025 tanggal 02 Desember 2024, mendapat alokasi dana sebesar Rp. **28.661.393.000,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2025 Stasiun PSDKP Belawan telah memiliki realisasi sebesar **Rp 26,441,123,902,-** (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) atau 92,25% berdasarkan data OMSPAN.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Selama Triwulan IV dan sepanjang Tahun 2025, kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mencapai hasil yang baik. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Program, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Pada Tahun 2025, terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU tahun 2025 dengan nilai NKO sebesar 107,86. Selama kurun waktu Triwulan IV UPT Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan penilaian terhadap 7 Indikator Kinerja dengan ke 7 IK tersenut berstatus hijau (baik).

### B. Saran dan Rekomendasi

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian – bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada periode Triwulan I Tahun 2026. Saran dan rencana perbaikan tersebut kami tampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 78. Saran dan Rencana Tindak Lanjut atas pencapaian kinerja

No	Saran	Rencana Aksi	Waktu
1	Melaksanakan kontrol terhadap IKU Tahun 2026	Melakukan rapat perencanaan dan rapat evaluasi	• Triwulan I - IV

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Syamsu Rokhman  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Belawan

Muhamad Syamsu Rokhman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2.	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran satker Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	71,5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker Stasiun PSDKP Belawan (nilai)	92
14. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Belawan (indeks)		81	
15. Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Belawan (nilai)		86	
16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Belawan (%)		100	
17. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)		95	
18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)		88,5	
19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Belawan (nilai)		80	
20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Belawan (inovasi)		1	
21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)		70	

**Data Anggaran:**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	13.903.257.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	316.775.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.094.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	100.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	16.268.264.000
<b>Total Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025</b>		<b>31.682.833.000</b>

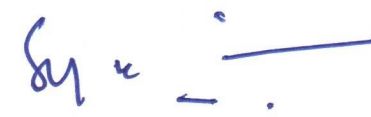
Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditiensdtkp@kkp.go.id](mailto:ditiensdtkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Syamsu Rokhman  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Belawan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

  
Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Belawan

  
Muhamad Syamsu Rokhman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN**  
**PERIKANAN BELAWAN**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>		<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>		<b>TARGET</b>
1.	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	82
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	2	Indeks operasi kapal pengawas	92
		3	Indeks operasi speedboat pengawas	92
		4	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
3.	Terselenggaranya Intelijen Kelautan Dan Perikanan Secara Efektif	5	Nilai kualitas operasi intelijen Kelautan	100
		6	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
4.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	7	Nilai kualitas pengawasan sumber daya Kelautan	82
5.	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	8	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
7.	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif Dan Sesuai Ketentuan	11	Indeks penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
8.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Stasiun PSDKP Belawan	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Belawan	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Belawan	86

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100%
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup stasiun psdkp Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%
	18 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80
	19 Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan	75
	20 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Belawan	77
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

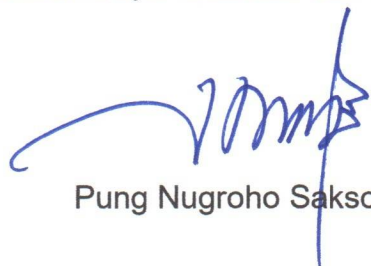
**Data Anggaran:**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	12.804.051.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	124.487.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	390.068.000
2.	Program Dukungan Manajemen	15.677.542.000
<b>Total Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2025</b>		<b>28.996.148.000</b>

Jakarta, Desember 2025

PIHAK KEDUA

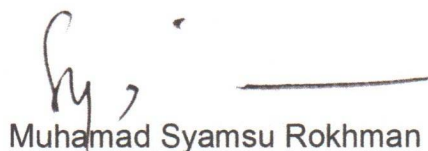
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA

Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman

# PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : B.1539/PPS.BLW/KP.540/VIII/2025

Diberikan Kepada

STASIUN PSDKP BELAWAN

Atas Dukungan dan Kerjasama Terhadap Peningkatan  
Kepatuhan Perizinan Kapal Perikanan dan PNPB SDA  
di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan  
Periode Semester I Tahun 2025

Belawan, 8 Agustus 2025  
Kepala Pelabuhan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ir. Mansur, MM

NIP. 19660312 199103 1 002



**KOMPAAK**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

No: 100/1.02.01/PK-PGM/DD/X/2025



Palang  
Merah  
Indonesia

UTD PMI  
KOTA MEDAN

# Terima Kasih & Penghargaan

Kepada:

**PSDKP BELAWAN**

Atas Partisipasi & Kerjasamanya

Dalam Rangka Kegiatan Donor Darah Suka Rela

Medan, 21 Oktober 2025

PALANG MERAH INDONESIA



Dr. Harry Butarbutar, Sp.B.

Kepala

CEK KEASLIAN





MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Piagam Penghargaan

NOMOR: B.622/MEN-KP/VI/2025

Diberikan kepada:

## Stasiun PSDKP Belawan

Sebagai Unit Kerja Berprestasi dalam Pemberantasan *IUU Fishing*

Jakarta, 5 Juni 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN



SAKTI WAHYU TRENGGONO